

**SKRIPSI**

**DINAMIKA KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT  
BUGIS (STUDI KASUS KELURAHAN TATAE KECAMATAN  
DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG)**



**OLEH**

**MUHAMMAD RUSDI BIN MOHD TALIB  
NIM. 18.3500.022**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2025**

**DINAMIKA KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT  
BUGIS (STUDI KASUS KELURAHAN TATAE KECAMATAN  
DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG)**



**OLEH :**

**MUHAMMAD RUSDI BIN MOHD TALIB  
NIM. 18.3500.022**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2025**

## PERSETUJUAN KOMISI SKRIPSI

Judul Skripsi : Dinamika Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Bugis (Studi Kasus Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Muhammad Rusdi bin Mohd Talib

NIM : 18.3500.022

Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah B-1033/In.39/FUAD.03/PP.00.9/05/2025

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Abd. Wahidin, M.Si.  
NIP : 197801282023211005

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurhidam, M.Hum.  
NIP. 196412311992031045

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dinamika Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Bugis (Studi Kasus Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Muhammad Rusdi bin Mohd Talib

NIM : 18.3500.022

Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah B-1033/In.39/FUAD.03/PP.00.9/05/2025

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Abd. Wahidin, M.Si.

(Ketua)

Mahyuddin, S.Sos, M.A.

(Anggota)

Abd. Rasyid, M.Si.

(Anggota)



Mengetahui:



Dekan,  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Dr. A. Nurkidam, M.Hum.<sup>12</sup>  
NIP.196412311992031045

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Kesenjangan Gender Dalam Masyarakat Bugis (Studi Kasus Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)” sebagai Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Sosiologi Agama. Skripsi ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam Dinamika Kesenjangan Gender Dalam Masyarakat Bugis. Penelitian ini dilakukan secara khusus masyarakat Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Dinamika Kesenjangan Gender Dalam Masyarakat Bugis.

Peneliti Menyatakan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda Hj. Muliati dan ayahanda Mohd Thalib beserta dua saudara saya Rosma Fatima dan Roslinda tercinta diman dengan berkah dan tulusnya, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan kepada bapak Abd. Wahidin, M.Si selaku pembimbing utama atas segala bantuan dan bimbingan yang telah Diberikan, penulis ucapkan terima kasih:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare, atas visi kepemimpinan dan dukungan institusional yang telah menciptakan iklim akademik yang sangat baik bagi seluruh civitas akademika.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I. selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. selaku Wakil Dekan II. Terima kasih atas segala kemudahan dan kebijakan yang telah diberikan, serta dedikasi tinggi yang

menjadi teladan bagi penulis.

3. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Bapak Mahyuddin, S.Sos., M.A., dan Bapak Abd. Rasyid, M.Si., selaku dosen penguji yang telah dengan sabar, teliti, dan penuh perhatian memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini. Segala arahan, motivasi, dan bimbingan yang telah Bapak berikan menjadi pelajaran berharga bagi saya, tidak hanya dalam penyusunan karya ilmiah ini, tetapi juga sebagai bekal pengetahuan dan pengalaman yang akan berguna di masa mendatang.
4. Bapak dan Ibu dosen studi Sosiologi Agama yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare,.
5. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar saya atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan semangat tersendiri di setiap langkah perjalanan ini. Dalam lelah, dalam ragu, dan dalam jatuhnya harapan, dukungan keluarga selalu menjadi pengingat untuk terus bangkit dan melanjutkan. Tanpa doa yang tulus dan keyakinan kalian, mungkin saya tidak akan sampai pada titik ini. Terima kasih telah menjadi tempat kembali yang hangat, penuh penerimaan, dan penguat hati dalam proses panjang penyusunan skripsi ini
8. Kepada Nugrahyu, S.Sos. dan Iin Megawati Idris, S.Sos. serta semua pihak

yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

9. Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. Berkenan menilai segala Kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 08 Juli 2025 M

Penyusun,



Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib  
NIM : 18.3500.022

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib  
NIM : 18.3500.022  
Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia, 04 Februari 1999  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Judul Skripsi : Dinamika Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Bugis (Studi Kasus Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Juli 2025 M

Penyusun,



Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib  
NIM : 18.3500.022

## ABSTRAK

**Muhammad Rusdi bin Mohd Talib**, *Dinamika Kesenjangan Gender dalam Masyarakat Bugis (Studi Kasus Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)* dibimbing oleh bapak Abd. Wahidin.

Penelitian ini membahas norma kesetaraan gender dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai budaya tradisional berpadu dengan pandangan modern dalam praktik kehidupan keluarga. Masyarakat Bugis dikenal memiliki prinsip budaya seperti sipakatau (saling memanusiakan), sipakalebbi (saling menghormati), dan sipakainge (saling mengingatkan) yang menjadi dasar relasi sosial. Namun dalam realitasnya, struktur patriarkis masih kuat, di mana laki-laki sering menjadi pengambil keputusan utama, terutama dalam urusan pernikahan, keuangan, dan pendidikan anak.

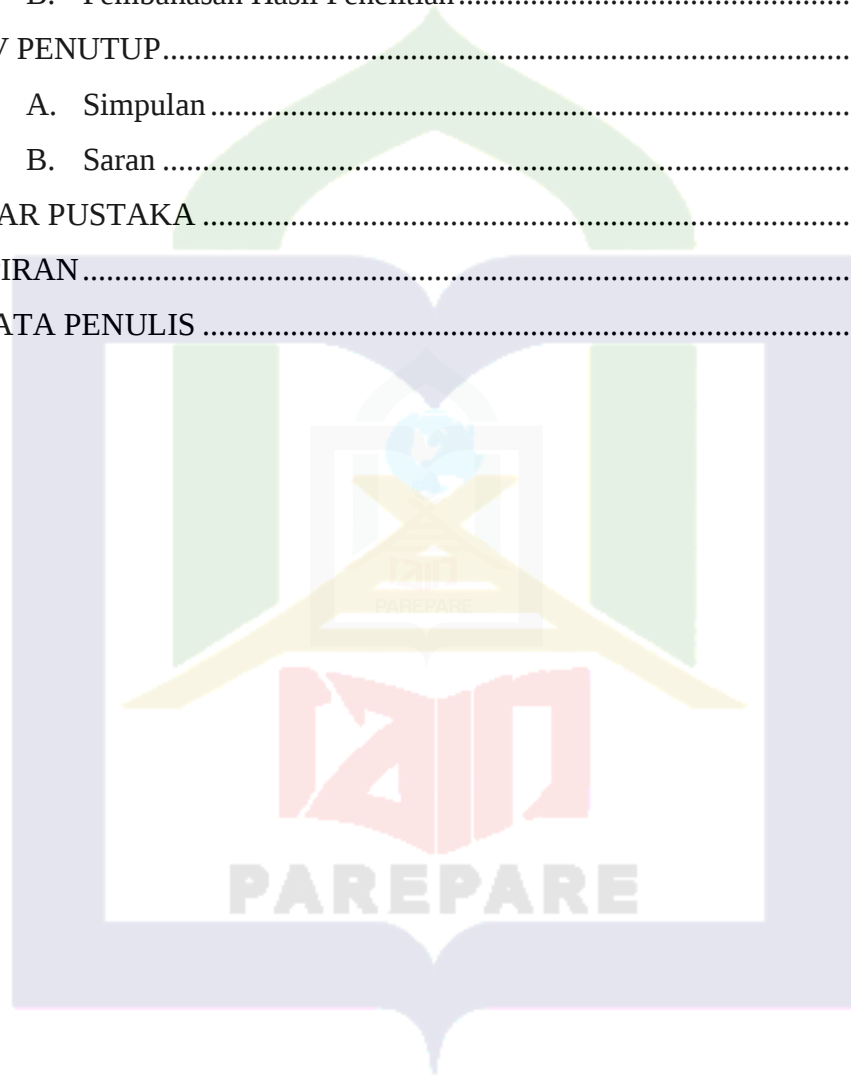
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran peran gender, khususnya dalam ranah ekonomi, pendidikan, dan ruang publik. Perempuan tidak lagi hanya berperan dalam urusan domestik, tetapi juga aktif sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan bersama suami. Nilai-nilai budaya seperti siri' (harga diri) dan pessae (rasa malu) yang sebelumnya memperkuat pembagian peran tradisional, kini mulai dimaknai ulang untuk mendukung partisipasi perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kesetaraan gender mulai berkembang, pemahaman masyarakat terhadap konsep gender masih terbatas, dan struktur patriarkal tetap kuat. Dalam perspektif teori konflik, kondisi ini mencerminkan pertentangan antara struktur kekuasaan lama dan dorongan perubahan sosial. Sedangkan dalam teori feminisme, dinamika ini dipandang sebagai bagian dari perjuangan perempuan untuk memperoleh ruang yang lebih adil dalam rumah tangga maupun ruang publik.

**Kata kunci:** Budaya Lokal, Feminisme, Kesenjangan Gender, Masyarakat Bugis, Teori Konflik, Sosiologi Gender.

## DAFTAR ISI

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                             | ii   |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....             | iii  |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....                 | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                            | v    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                | ix   |
| ABSTRAK .....                                   | x    |
| DAFTAR ISI.....                                 | xi   |
| DAFTAR TABEL .....                              | xiii |
| DAFTAR GAMBAR .....                             | xiv  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                           | xv   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                     | xvi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                         | 1    |
| A. Latar Belakang .....                         | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                         | 8    |
| C. Tujuan Penelitian .....                      | 9    |
| D. Kegunaan Penelitian .....                    | 9    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                    | 10   |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....            | 10   |
| B. Landasan Teoritis.....                       | 17   |
| C. Kerangka Konseptual.....                     | 25   |
| D. Kerangka Pikir .....                         | 30   |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                  | 30   |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....        | 30   |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....            | 30   |
| C. Fokus Penelitian.....                        | 31   |
| D. Jenis dan Sumber Data.....                   | 31   |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... | 32   |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| F. Uji Keabsahan Data .....                  | 34   |
| G. Teknik Analisis Data .....                | 35   |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... | 37   |
| A. Hasil pembahasan .....                    | 37   |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian .....         | 46   |
| BAB V PENUTUP.....                           | 61   |
| A. Simpulan .....                            | 61   |
| B. Saran .....                               | 62   |
| DAFTAR PUSTAKA .....                         | 64   |
| LAMPIRAN .....                               | I    |
| BIODATA PENULIS .....                        | XXIV |



## DAFTAR TABEL

| No | Judul Tabel               | Halaman |
|----|---------------------------|---------|
| 1. | Tabel 1.1 Profil Informan | 39      |



## DAFTAR GAMBAR

| No | Judul Gambar                    | Halaman |
|----|---------------------------------|---------|
| 1. | Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir | 34      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul Lampiran                             | Halaman |
|----|--------------------------------------------|---------|
| 1. | Lampiran 1 Pedoman Wawancara               | II      |
| 2. | Lampiran 2 Biodata Narasumber              | V       |
| 3. | Lampiran 3 Surat Ketetapan Pembimbing      | XV      |
| 4. | Lampiran 4 Surat izin meneliti dari kampus | XVI     |
| 5. | Lampiran 5 Surat izin meneliti dari dinas  | XVII    |
| 6. | Lampiran 6 Surat selesai meneliti          | XVIII   |
| 7. | Lampiran 7 turnitin                        | XX      |
| 7. | Lampiran 8 Dokumentasi                     | XXI     |
| 8. | Biodata Penulis                            | XXIV    |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا     | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب     | Ba   | B                  | Be                         |
| ت     | Ta   | T                  | Te                         |
| ث     | Tha  | Th                 | te dan ha                  |
| ج     | Jim  | J                  | Je                         |
| ح     | Ha   | h                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ     | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د     | Dal  | D                  | De                         |
| ذ     | Dhal | Dh                 | de dan ha                  |
| ر     | Ra   | R                  | Er                         |
| ز     | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س     | Sin  | S                  | Es                         |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ش  | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص  | Shad   | ş  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Dad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ta     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘ain   | ‘  | koma terbalik ke atas       |
| غ  | Gain   | G  | Ge                          |
| ف  | Fa     | F  | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q  | Qi                          |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل  | Lam    | L  | El                          |
| م  | Mim    | M  | Em                          |
| ن  | Nun    | N  | En                          |
| و  | Wau    | W  | We                          |
| هـ | Ha     | H  | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ’  | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                          |

Hamzah ( ء ) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.  
Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أَ    | Fathah | A           | A    |
| إِ    | Kasrah | I           | I    |
| أُ    | Dammah | U           | U    |

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | fathah dan ya  | Ai          | a dan i |
| أَوْ  | fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan<br>Huruf | Nama | Huruf dan<br>Tanda | Nama |
|----------------------|------|--------------------|------|
|----------------------|------|--------------------|------|

|       |                            |   |                        |
|-------|----------------------------|---|------------------------|
| آ / ا | fathah dan alif<br>atau ya | Ā | a dan garis<br>di atas |
| إ     | kasrah dan ya              | Ī | i dan garis<br>di atas |
| أ     | dammah dan wau             | Ū | u dan garis<br>di atas |

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

الْجَنَّةَ رَوْضَةٌ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

|            |                   |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا   | : <i>rabbānā</i>  |
| نَجَّيْنَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقُّ   | : <i>al-ḥaqq</i>  |
| الْحَجُّ   | : <i>al-ḥajj</i>  |
| نُعَمِّ    | : <i>nu‘ima</i>   |
| عُدُّوْ    | : <i>‘aduwwun</i> |

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| بِئَرِّ | : <i>‘Arabi</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i> ) |
| عَلِيٍّ | : <i>‘Ali</i> (bukan <i>‘Alyy</i> atau <i>‘Aly</i> )        |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| الشَّمْسُ       | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )    |
| لُزْ زَلْزَلَةٍ | : <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> ) |
| الْفَلْسَفَةُ   | : <i>al-falsafah</i>                             |
| الْبِلَادُ      | : <i>al-bilādu</i>                               |

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ẓilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

اللَّهُ حَمْدُهُ فِي هُمْ *Hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*).

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subḥānahū wa ta‘āla

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al- sallām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karenadalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : Dan lain-lain atau dan kawan-kawan (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesetaraan gender merupakan isu global yang terus menjadi sorotan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Di Indonesia, isu ini mendapatkan perhatian serius seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran laki-laki dan perempuan yang seimbang dalam pembangunan. Meskipun telah banyak kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender, kenyataannya di tingkat lokal, penerapan nilai-nilai kesetaraan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan budaya dan konstruksi sosial yang telah mengakar kuat.<sup>1</sup>

Kesetaraan gender mulai banyak dikaji di kalangan akademisi Indonesia. Dalam masyarakat sosial posisi perempuan yang demikian sulit untuk mengimbangi posisi laki-laki, terutama di lingkungan publik yang masih sulit melepaskan diri dari tanggung jawab di lingkungan domestik. Adanya hal ini sudah merupakan persepsi budaya secara umum.

Gender merupakan interpretasi budaya terhadap perbedaan gender. mengetahui bahwa gender memang terkait dengan perbedaan jenis kelamin akan tetapi tidak selalu dikaitkan dengan perbedaan fisiologis, sejauh ini ditemukan di masyarakat. Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang dimiliki laki-laki dan perempuan karena bentuk budaya atau lingkungan sosial di mana orang tumbuh dan berkembang. Gender adalah sebuah konsep yang mengacu pada

---

<sup>1</sup> Yunus, Rabina. *Analisis Gender Terhadap Fenomena Sosial*. Humanities Genius, 2022.

peran dan tugas, tanggung jawab.<sup>2</sup> Laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial yang dapat berubah seiring dengan perubahan zaman.<sup>3</sup> Ketika kita berbicara tentang gender, kita berbicara tentang laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam masyarakat biseksual, ternyata perempuan banyak mengalami ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan karena faktor budaya, struktur, dan corak agama ajaran.

Islam telah mengungkapkan dirinya sebagai pembawa rahmat bagi seluruh dunia, termasuk bagi kaum wanita. Nilai-nilai fundamental yang melandasi ajaran Islam, seperti perdamaian, pembebasan derajat antara laki-laki dan perempuan, banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, namun pada kenyataannya disparitas antara ajaran Islam dengan realitas kehidupan sehari-hari. Adapun dalam Kepmendagri No. 132 disebutkan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.<sup>4</sup>

Relasi gender adalah konsep dan realitas pembagian kerja social serta fungsi antara laki-laki dan perempuan, yang didasarkan bukan pada paham normative dan dibagikan secara biologis, tetapi pada kualitas dan keterampilan dan peran berdasarkan konvensi social. Relasi gender ada dalam hubungan keluarga antara suami dan istri dalam rumah tangga yang dibangun atas dasar pengertian, saling mengetahui dan saling tanggung jawab serta menghormati demi kasih sayang untuk perkembangan keluarga.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Khusniati Rofiah, M. S. I. *Produktivitas Ekonomi Perempuan Dalam Kajian Islam Dan Gender*. Q Media, 2021.

<sup>3</sup> Siti Musdah Mulia Dkk, *Keadilan Kesenjangan Gender: Perspektif Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 2001). H. 8.

<sup>4</sup> Kepmendagri No.132 Tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum, Pasal .I

<sup>5</sup> Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007), H. 18.

masyarakat. menjadi lebih kompleks.

Hadir Islam di dunia hanya untuk melihat manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Jika ada norma yang dipaksakan oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan prinsip keadilan, maka norma tersebut harus ditolak. Begitu juga dengan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. oleh itu, jika kita menemukan suatu hukum atau norma yang bertentangan dengan Al-Qur'an, maka sebenarnya tidak ada teks, tidak ada Al-Qur'an, tidak ada perintah Allah. Oleh karena itu, jangan biarkan seseorang memperlakukan perempuan secara sewenang-wenang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 34:

وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ حُصِّنَتْ لِهِنَّ وَأَمْلاكُهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَهُنَّ رِحْمَةً مِّنْ رَبِّهِنَّ ذَٰلِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ إِذَا نَادَيْتُمُوهُنَّ لِتُبَيِّتَ بَيْنَهُنَّ وَالْبَتُولَاتِ أَنْ يَخْفَيْنَ عَلَيْكُمْ خَفَا بِهِنَّ الْإِنسَانُ لَمَنْزِلَةِ إِحْسَانٍ أُولَٰئِكَ أَنكِحْتُمُوهُنَّ بِمَا بَيَّعْتُمُوهُنَّ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَهُنَّ أَنْ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِمَا نَكَحْتُمُوهُنَّ فَإِذَا زَوَّجْتُمُوهُنَّ فَلَيْسَ بِهِنَّ جُنَاحٌ وَلَا عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(٣٤)

PAREPARE

emahnya:

ai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. oleh itu, jika kita c  
maka sebenarnya tidak ada teks, tidak ada Al-Qur'an, tidak ada  
olehkan seseorang memperlakukan perempuan secara sewenang-w  
Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an Allah berfirman dal  
34:

وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ حُفَّتْ رُءُوسُهُنَّ يَدْعُونَ إِلَى الصَّالِحِ وَبِالنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَلَحَتْ قُنُوتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ ظُهُورَهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا سَبِيلَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

34

emahnya:

34: وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْكُمْ نُسْرًا نَعْتَصِلُ بِهَا حَفِظْتُ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ الظُّهُورَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَهِيَ مِنَ الْغَافِلِينَ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

emahnya:

emahnya:

kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat

mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukullah mereka, tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. (Q.S. An-Nisa. 5:34)<sup>6</sup>

Dalam Q.S. An-Nisa. 4: 34 Nasarudin Umar menyatakan kata yang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan peran dan relasi gender. Oleh karena, bias saja orang dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut pandangan gender dapat berperan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.<sup>7</sup>

Pada proses pembagian peran perempuan tidak jarang dapat menyebabkan ketidaksambungan fungsi atau terjadi proses fungsi yang lain mencampuri fungsi yang lain, yaitu apabila hal ini terjadi terus-menerus maka dapat menyebabkan intensitas yang kuat sehingga dapat menyebabkan konflik pekerjaan rumah.<sup>8</sup> Masyarakat Bugis adalah salah satu kelompok masyarakat yang hidup di Nusantara, yang memiliki pandangan tentang eksistensi manusia. Eksistensi manusia yang hidup dalam ranah kebudayaan Bugis tentunya memiliki ciri khas, yang membedakannya dengan pandangan yang sama, yang hidup dalam kebudayaan-kebudayaan lainnya.

Masyarakat di Kelurahan Tatae melihat bahwa perempuan memiliki peran atau tanggung jawab ganda, yaitu pekerjaan domestik dan pekerjaan luar rumah. Perempuan yang seperti merupakan perempuan yang memiliki paham bahwa dalam rumah tangga itu diperlu kedua dalam membangun sehingga perempuan juga mampu berkarier. Persoalannya adalah di dalam masyarakat memahami konsep gender,

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019), Surah An-Nisa [4]: 34.

<sup>7</sup> Nurhasana, "Pemikiran Hamka Dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender," *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 05, No. 02 (2020), H. 291.

<sup>8</sup> Anita Rahma, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender," *Jurnal Palastren* 8, No. 1 (2015), H 13, 14.

perempuan yang dilabelkan pekerjaan domestik maka semua pekerjaan rumah di berikan kepada perempuan saja.

Di Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, kehidupan masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Bugis. Peran gender sering kali dibatasi oleh harapan sosial yang telah berlangsung turun-temurun. Perempuan masih banyak yang dibebani dengan peran domestik, sementara laki-laki lebih didorong untuk aktif di ranah publik. Ketimpangan ini memunculkan berbagai persoalan, mulai dari rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan ekonomi, hingga kekerasan berbasis gender yang tersembunyi di balik norma adat.

Kelurahan Tatae, sebagai bagian dari Kecamatan Duampanua, memiliki potensi untuk menjadi model dalam penerapan kebijakan kesetaraan gender. Dengan dukungan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat kelurahan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab Pinrang untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi perempuan dan anak. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), masyarakat aktif dalam berbagai kegiatan untuk mendorong kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak. Beberapa inisiatif penting antara lain, sosialisasi desa ramah perempuan, edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pelatihan penanganan kasus kekerasan. Contoh kasus yang ditemukan, pada 17-18 Oktober 2024, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pinrang

mengadakan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak untuk guru dan staf puskesmas. Pelatihan ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepala Dinas (DP2KBP3A) Kabupaten Pinrang, dr. Ramli Yunus, membuka pelatihan ini secara resmi. Inisiatif-inisiatif tersebut telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.<sup>9</sup> Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam hal implementasi di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program-program ini.

Tujuan penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender diterima, dipahami, dan dipraktikkan oleh masyarakat Bugis di Kelurahan Tatae. Dengan pendekatan studi kasus, peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu mengidentifikasi faktor-faktor budaya, sosial, dan struktural yang memengaruhi relasi gender di tingkat lokal. Selain itu, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi intervensi yang kontekstual dan berkelanjutan dalam upaya mendorong kesetaraan gender di komunitas lokal berbasis budaya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Bugis (Studi Kasus Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”** dengan harapan yang dalam mampu didalam masyarakat bugis memahami konsep gender dan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat maupun berumah tangga dan melahirkan keluarga yang sakinah.

---

<sup>9</sup> Swara Pendidikan, “Guru dan Staf Kesehatan di Pinrang Ikuti Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak,” *swarapendidikan.co.id*, 18 Oktober 2024, diakses 21 Mei 2025, <https://swarapendidikan.co.id/guru-dan-staf-kesehatan-di-pinrang-ikuti-pelatihan-penanganan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/>.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman tentang kesetaraan gender dalam bugis di Kelurahan Tatae?
2. Bagaimana norma kesetaraan gender dalam masyarakat bugis di Kelurahan Tatae?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pemahaman tentang kesetaraan gender dalam bugis di Kelurahan Tatae.
2. Untuk menganalisis norma kesetaraan gender dalam masyarakat bugis di Kelurahan Tatae.

## **D. Kegunaan penelitian**

Dari penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian akan berguna untuk hal sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Peneliti ini diharapkan memberikan paradigma di bidang ilmu sosial guna menambah wawasan dan pengetahuan guna merumuskan permasalahan dalam melihat peran gender dalam bugis.

2. Kegunaan praktis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan bacaan di perpustakaan dan bisa juga menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian tentang kesetaraan gender dalam masyarakat bugis merupakan penelitian yang banyak juga dikaji bagi peneliti yang lain, diantaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Umar Ramli dan La Basri<sup>10</sup> dalam karya ilmiahnya yang berjudul " Peran Gender Pada Masyarakat Bugis" menganalisis bibliografi tentang pembagian peran gender di masyarakat Bugis yang terbentuk oleh adat dan budaya. Memberi pemahaman bahwa gender konstruktif ini tercermin dalam ekspektasi sosial terhadap perempuan dan laki-laki. Peran gender tidak semata-mata berdasarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan hasil dari ekspektasi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Bugis memiliki pola perilaku dan tanggung jawab tertentu yang dilekatkan pada masing-masing jenis kelamin, yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan patut dijalani. Misalnya, perempuan seringkali diharapkan menekuni peran domestik, sementara laki-laki lebih dominan dalam ranah publik dan pengambilan keputusan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa peran gender dalam masyarakat Bugis bersifat struktural dan kultural, sehingga perubahan terhadap kesetaraan gender perlu memperhatikan konteks adat dan nilai lokal yang mengakar kuat. Temuan ini sangat relevan digunakan sebagai dasar dalam memahami dinamika kesetaraan gender di wilayah seperti Kelurahan Tatae, Kecamatan

---

<sup>10</sup> Umar Ramli dan La Basri, Peran Gender pada Masyarakat Bugis, Jurnal Sosiologi, Volume X, No. 2, 2021, hlm. 45.

Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang memiliki budaya Bugis yang masih kental. Adapun persamaannya sama-sama menyoroti budaya dan struktur sosial masyarakat Bugis, dengan fokus khusus pada isu peran gender. Baik dalam kajian Umar Ramli dan La Basri maupun dalam penelitian ini, terlihat bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Bugis tidak terlepas dari konstruksi budaya dan nilai-nilai adat yang telah mengakar kuat. Pendekatan sosiologis dan budaya digunakan oleh kedua penelitian untuk mengungkap bagaimana peran gender dibentuk dan berfungsi dalam konteks sosial. Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan yang mencolok antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Umar Ramli dan La Basri lebih bersifat konseptual dan berskala umum, karena hanya mengkaji konstruksi sosial peran gender dalam masyarakat Bugis melalui pendekatan bibliografis tanpa berfokus pada satu wilayah tertentu. Sementara itu, penelitian ini mengkaji secara mendalam dinamika kesetaraan gender dalam konteks lokal, yakni di Kelurahan Tatae, dengan metode lapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, pendekatan teori yang digunakan juga berbeda. Jika Umar Ramli dan La Basri lebih menekankan pembentukan peran gender secara tradisional, maka penelitian ini menitikberatkan pada teori konflik, feminisme, dan sosiologi gender guna mengungkap ketimpangan dan dinamika relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, walaupun sama-sama berangkat dari akar budaya Bugis, penelitian ini lebih mengarah pada analisis transformasi sosial dan kesetaraan gender, bukan sekadar pada deskripsi peran gender yang bersifat statis.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hasmawati dan kawan-kawan<sup>11</sup> dengan judul penelitian “Relasi Gender Perempuan dalam Teks La Galigo”. Melalui analisis

---

<sup>11</sup> Hasmawati, dkk. Relasi Gender Perempuan dalam Teks La Galigo, Jurnal Al-Adyaan, Vol. 13 No. 1, 2022, hlm. 23–35.

tekstual terhadap tokoh-tokoh perempuan dalam La Galigo, ditemukan bahwa perempuan tidak hanya digambarkan sebagai sosok pasif atau domestik, melainkan juga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan penting, baik dalam ranah keluarga maupun politik. Tokoh-tokoh perempuan seperti We Tenriabeng digambarkan sebagai figur yang memiliki kewibawaan, kebijaksanaan, bahkan kekuatan spiritual yang dihormati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya literer Bugis, terdapat ruang simbolik bagi pengakuan terhadap kekuatan perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi gender dalam La Galigo memperlihatkan adanya relasi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, meskipun tetap berada dalam kerangka nilai-nilai budaya tradisional yang mengatur posisi sosial masing-masing. Dengan demikian, teks La Galigo tidak hanya mencerminkan pandangan budaya masa lalu, tetapi juga menjadi sumber alternatif dalam memahami peran perempuan dalam masyarakat Bugis secara historis dan kultural. Persamaan utama dari kedua penelitian ini terletak pada pengakuan terhadap nilai kesetaraan yang telah lama hidup dalam masyarakat Bugis. Penelitian Hasmawati dkk. menampilkan tokoh-tokoh perempuan dalam La Galigo yang memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan, bahkan dalam urusan politik dan spiritual. Hal ini menguatkan temuan di lapangan oleh peneliti dalam studi di Kelurahan Tatae, yang menunjukkan bahwa perempuan di masyarakat kontemporer Bugis juga memainkan peran signifikan dalam keluarga, ekonomi, dan struktur sosial, meskipun tantangan patriarki tetap ada. Namun demikian, terdapat perbedaan pendekatan dan fokus analisis. Penelitian Hasmawati dkk. menggunakan pendekatan tekstual-literer dengan menelaah naskah sastra klasik Bugis untuk memahami relasi gender berdasarkan simbol, karakter, dan narasi budaya masa lampau. Sementara itu, penelitian di

Kelurahan Tatae menggunakan pendekatan empiris-sosiologis, dengan observasi langsung, wawancara tokoh adat, tokoh perempuan, dan masyarakat umum, untuk melihat dinamika kesetaraan gender secara aktual dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat Bugis masa kini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andi Herlina dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Program Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Di Kelurahan Gilireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo”. Pada penelitian ini menganalisis bagaimana respon masyarakat terhadap program peningkatan kesetaraan Gender dalam pembangunan yang di program oleh pemerintah. Selain itu, pemahaman tentang kesetaraan gender di Kelurahan Gillireng Wajo. Adanya peningkatan kesetaraan gender merupakan bentuk mewujudkan keadilan gender. Pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan biasanya perempuan di kecilkan dan termarginalkan karena kemampuan yang diragukan.<sup>12</sup> Berdasarkan penelitian di atas persamaan adalah melihat laki-laki dan perempuan melakukan kesetaraan gender sedangkan pembeda adalah fokus kepada pembangunan dan meningkatkan keadilan gender manakala penulis lebih kepada dinamika kesetaraan gender kepada masyarakat Bugis.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Konflik**

Istilah “konflik” berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Menurut Antonius, dkk. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat

---

<sup>12</sup> Herlina, Andi. *Respon Masyarakat Terhadap Program Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Di Kelurahan Gilireng Kecamatan Gilireng Kapubaten Wajo*. Diss. Iain Parepare, 2020.

atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan individu.<sup>13</sup> Konflik itu muncul ketika ada dua pihak perseorangan maupun kelompok mereka terlibat dalam interaksi namun saling bertentangan. Karena pada dasarnya konflik itu terjadi karena adanya interaksi. Konflik terjadi pada segala lingkup social seperti dalam lingkup terkecil yaitu keluarga, masyarakat secara luas, atau bahkan Negara. Dua pihak yang berkonflik akan berusaha melakukan segala cara agar pihak lain mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya.

Teori konflik dari Lewis A. Coser adalah salah satu perspektif didalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>14</sup> Perbedaan sesungguhnya adalah sesuatu yang normal apabila terjadi dalam kehidupan social. Konflik merupakan fenomena social yang akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Konflik terjadi karena adanya interaksi individu satu dengan individu lain, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Individu satu dengan individu lainnya pasti memiliki tujuannya masing-masing, tapi terkadang dalam menuju tujuannya individu harus berlomba atau berkompetisi dengan individu lain yang juga akan menuju tujuannya. Demi menuju tujuan masing-masing terkadang saling menjatuhkan individu lain. Karena saling menjatuhkan maka konflik akan berakibat negative pada salah satu

---

<sup>13</sup> Antonius Atosokhi Gea, Dkk. *Relasi Dengan Sesama*(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), 175

<sup>14</sup> Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

pihak yang dijatuhkan. Kurangnya rasa toleransi dan saling mengerti tujuan individu lain atau kebutuhan akan menimbulkan adanya konflik. Coser memiliki perbedaan dengan ahli sosiologi lainnya karena menggabungkan dua perspektif yang berbeda yaitu teori fungsionalis dan teori konflik, sehingga sering disebut sebagai teori fungsionalisme konflik. Jika para ahli sosiologi lainnya memandang konflik itu merupakan hal yang negative berbeda dengan Coser. Konflik memiliki dua wajah, pertama member integrasi sistem social. Kedua mengakibatkan terjadinya perubahan social.<sup>15</sup> Coser menekankan fungsi dari konflik ialah untuk mempertahankan kelompok padahal menurut ahli sosiologi lainnya konflik dianggap sebagai penyebab perubahan social. Fungsi konflik menurut Lewis A. Coser diantaranya adalah Konflik dapat mengeratkan kembali kelompok yang mulai longgar sehingga menjadi lebih memperkuat solidaritas antar anggotanya. Masyarakat yang mulai renggang hubungannya, konflik dengan masyarakat lain bisa menjadi kekuatan untuk mempersatukan kembali. Dalam hal ini Coser telah mengembangkan apa yang telah dikatakan oleh George Simmel. Semakin besar konflik dengan kelompok lain maka kekuatan solidaritas dan integrasi sesama anggota kelompok akan lebih tinggi pula. Rasa tidak suka dan konflik tidak selalu merusak kelompok yang ada.<sup>16</sup>

Konflik biasa dianggap sebagai sesuatu yang negative karena berhubungan dengan pertentangan, percekocokan, perselisihan, dan bahkan kekerasan. Konflik dapat terjadi antar individu maupun kelompok. Karena pada dasarnya konflik akan terus tercipta dalam kehidupan selama manusia masih

---

<sup>15</sup> Wibisono, M. Yusuf. *Sosiologi Agama*. Prodi S2 Studi Agama-Agama Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

<sup>16</sup> Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*(Jakarta: Prenada Media Group, 2005),354

memiliki tujuan dan interaksi dengan manusia lain. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Setiap individu pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, dalam usahanya memenuhi kebutuhan individu pasti akan berinteraksi dengan individu lain yang mungkin memiliki tujuan yang sama. Dengan memiliki tujuan yang sama terkadang dalam mencapai tujuannya individu menjatuhkan individu lain demi menuju kepentingannya tersebut.

Secara etimologis, konflik (conflict) berasal dari bahasa latin configure yang berarti saling memukul. Menurut Antonius, dkk. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan individu.<sup>17</sup> Konflik itu muncul ketika ada dua pihak perseorangan maupun kelompok mereka terlibat dalam interaksi namun saling bertentangan. Karena pada dasarnya konflik itu terjadi karena adanya interaksi. Konflik terjadi pada segala lingkup social seperti dalam lingkup terkecil yaitu keluarga, masyarakat secara luas, atau bahkan Negara. Menurut Lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan persaingan. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan

---

<sup>17</sup> Wati, Ni Luh Putu Merta. *Pengaruh Stres Kerja, Konflik Interpersonal Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Como Shambhala Estate Gianyar*. Diss. Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023.

antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses pembuatan sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, social, dan budaya) yang relative terbatas.<sup>18</sup>

Teori konflik, yang berakar dari pemikiran Karl Marx dan dikembangkan oleh sosiolog-sosiolog seperti Max Weber dan C. Wright Mills, melihat masyarakat sebagai ruang pertarungan antar kelompok dengan kepentingan yang saling bertentangan. Dalam konteks ini, konflik tidak dianggap sebagai hal yang abnormal, melainkan sebagai bagian alami dari kehidupan sosial, terutama ketika sumber daya seperti kekuasaan, status, dan ekonomi tidak didistribusikan secara merata.<sup>19</sup> Tiga kategori penting dalam teori konflik yang sering dikaji adalah pengambilan keputusan, pendidikan, dan ekonomi.

#### a) Pengambilan Keputusan

Dalam perspektif teori konflik, proses pengambilan keputusan dalam masyarakat tidak bersifat netral, melainkan mencerminkan dominasi kelompok elite. Kekuasaan politik tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap institusi politik dan media. C. Wright Mills menyebut fenomena ini sebagai “power elite,” yaitu kelompok kecil yang mengendalikan pemerintahan, militer, dan korporasi besar. Dalam konteks ini, keputusan publik sering kali tidak mencerminkan kepentingan rakyat secara luas, tetapi lebih kepada mempertahankan kepentingan elite penguasa.<sup>20</sup>

Dalam teori konflik, pengambilan keputusan tidak dianggap sebagai

---

<sup>18</sup> Robert Lawang, *Buku Materi Pokok pengantar Sosiologi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994), 53

<sup>19</sup> Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

<sup>20</sup> Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

proses netral atau objektif, melainkan sebagai arena pertarungan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan, kekuasaan, dan sumber daya yang tidak seimbang. Teori konflik, yang berakar pada pemikiran Karl Marx dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber dan C. Wright Mills, menyoroti bahwa kekuasaan dalam masyarakat terkonsentrasi pada segelintir elite yang mendominasi proses-proses sosial dan politik, termasuk proses pengambilan keputusan.

Dalam teori konflik, pengambilan keputusan dipandang sebagai proses yang dikendalikan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik. Teori ini menyoroti bahwa ketimpangan gender bukan terjadi karena perbedaan biologis, melainkan karena dominasi struktural yang membatasi akses perempuan terhadap posisi pengaruh dan kekuasaan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam teori konflik sangat berkaitan dengan kesetaraan gender. Ketika perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka cenderung diabaikan. Oleh karena itu, kesetaraan gender hanya bisa tercapai jika perempuan memiliki akses yang setara terhadap kekuasaan, dan jika struktur sosial yang patriarkis diubah agar mendukung partisipasi yang inklusif dan adil.

Dalam masyarakat Bugis, adat dan budaya memegang peranan penting dalam mengatur struktur sosial, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Secara historis, budaya Bugis memiliki struktur patriarkal, di mana laki-laki sering dianggap sebagai kepala rumah tangga dan pemegang keputusan utama, sementara perempuan menempati posisi domestik. Jika

dilihat dari perspektif teori konflik, struktur ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup rumah tangga. Contohnya, suami atau ayah dianggap sebagai *pappadeceng* (pemimpin yang bijak) yang memiliki hak utama dalam mengambil keputusan, termasuk soal pendidikan anak, keuangan keluarga, hingga relasi sosial dengan keluarga besar sedangkan istri sering kali diposisikan sebagai pendukung, dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan bisa dibatasi oleh norma adat atau tekanan sosial.

Dari sudut pandang teori konflik, struktur ini menciptakan dominasi laki-laki atas perempuan, karena posisi laki-laki didukung oleh adat, agama, dan konstruksi sosial. Perempuan mengalami penindasan simbolik dan struktural karena akses mereka terhadap proses pengambilan keputusan dibatasi oleh norma budaya.

#### b) Pendidikan

Dalam sistem pendidikan, teori konflik menyoroti bagaimana sekolah menjadi alat reproduksi ideologi dominan dan ketimpangan sosial. Menurut Pierre Bourdieu, sistem pendidikan mempertahankan “kekerasan simbolik” melalui kurikulum, bahasa, dan nilai-nilai yang mendukung budaya kelas atas. Pendidikan tidak hanya menciptakan mobilitas sosial, tetapi juga memperkuat stratifikasi sosial melalui seleksi, pelabelan, dan perbedaan kualitas antara sekolah-sekolah elit dan sekolah-sekolah pinggiran. Oleh karena itu, siswa dari latar belakang ekonomi rendah cenderung menerima

pendidikan yang lebih rendah kualitasnya, mempersempit peluang mereka untuk naik kelas sosial.<sup>21</sup>

Dalam kerangka sosiologi, pendidikan merupakan salah satu institusi sosial yang berperan penting dalam membentuk struktur masyarakat. Namun, menurut teori konflik, pendidikan bukanlah sarana netral untuk mobilitas sosial, melainkan alat bagi kelompok dominan untuk melanggengkan ketimpangan dan mempertahankan kekuasaan, termasuk dalam hal gender. Teori konflik melihat bahwa pendidikan dapat menjadi arena reproduksi ketidakadilan sosial, termasuk ketidaksetaraan gender.

Dalam perspektif teori konflik, sistem pendidikan sering mencerminkan nilai-nilai kelompok dominan dalam hal ini, nilai-nilai patriarkal yang menguntungkan laki-laki. Ini dapat terlihat dalam beberapa bentuk yaitu, kurikulum dan buku pelajaran sering kali menampilkan peran-peran tradisional yang bias gender, seperti laki-laki sebagai pemimpin atau pencari nafkah, dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga, stereotip dalam pemilihan jurusan yang dimana perempuan didorong memilih bidang "feminin" seperti pendidikan atau keperawatan, sementara laki-laki diarahkan ke bidang teknik, sains, dan teknologi dan minimnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan di lembaga pendidikan (kepala sekolah, dekan, rektor) mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam struktur pendidikan.

Menurut teori konflik, ketimpangan akses terhadap pendidikan mencerminkan struktur sosial yang tidak adil. Meskipun teori konflik menyoroti peran pendidikan dalam mempertahankan ketimpangan, teori ini

---

<sup>21</sup> Wiranata, Anom, And S. Ma. "Perubahan Sosial Dalam Perspektif Pierre Bourdieu." *Universitas Udayana, Kuta* (2020).

juga membuka ruang untuk perubahan sosial. Hubungan antara pendidikan, teori konflik, dan kesetaraan gender menunjukkan bahwa pendidikan tidak lepas dari pengaruh kekuasaan dan struktur sosial. Dalam masyarakat yang patriarkal, pendidikan sering memperkuat ketimpangan gender. Namun, jika dirancang secara adil dan inklusif, pendidikan dapat menjadi alat perjuangan untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara. Teori konflik membantu kita menyadari bahwa perubahan sistemik diperlukan, bukan hanya reformasi di permukaan.

Dalam beberapa rumah tangga Bugis tradisional, pendidikan anak laki-laki dianggap lebih penting dibandingkan anak perempuan. Hal ini karena laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah dan pemimpin keluarga di masa depan. Dalam satu keluarga Bugis tradisional, jika hanya ada biaya untuk menyekolahkan satu anak ke perguruan tinggi, biasanya anak laki-laki yang dipilih, dengan alasan bahwa "perempuan nanti ujung-ujungnya ke dapur juga." Dalam rumah tangga adat Bugis, pendidikan dapat berfungsi sebagai alat pelestari ketimpangan gender, ketika diatur oleh nilai-nilai patriarki. Namun, melalui perspektif teori konflik, kita dapat melihat bahwa pendidikan juga memiliki potensi besar sebagai sarana perubahan memberdayakan perempuan untuk menuntut keadilan, partisipasi, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Oleh karena itu, pendidikan yang adil dan kritis sangat penting untuk menciptakan rumah tangga dan masyarakat Bugis yang lebih setara gender

#### c) Ekonomi

Konflik dalam bidang ekonomi merupakan pusat dari teori konflik

klasik. Marx menekankan bahwa kapitalisme menciptakan ketimpangan antara pemilik modal (borjuis) dan pekerja (proletariat), di mana keuntungan diperoleh dari eksploitasi tenaga kerja. Sistem ekonomi dalam teori konflik tidak dirancang untuk keadilan sosial, tetapi untuk menjaga kepentingan pemilik kekuasaan ekonomi. Bahkan dalam sistem ekonomi modern, ketimpangan distribusi kekayaan, pengangguran struktural, dan kemiskinan adalah konsekuensi dari struktur yang menindas. Teori konflik mengajak kita melihat bahwa ketidaksetaraan ini bukan sekadar kegagalan individu, tetapi hasil dari sistem yang dirancang untuk menguntungkan sebagian kecil orang.<sup>22</sup>

Melalui tiga kategori ini, teori konflik mengajak kita memahami bahwa ketimpangan sosial bukan sesuatu yang terjadi secara alami, melainkan dibentuk dan dipelihara oleh sistem yang timpang. Oleh karena itu, perubahan sosial memerlukan kesadaran kritis dan perjuangan kolektif untuk menantang dominasi serta menciptakan tatanan yang lebih adil.

Penyebab munculnya konflik secara sederhana ada dua yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertical. Kemajemukan horizontal artinya struktur masyarakat yang majemuk secara cultural, seperti agama, ras, dan suku bangsa. Majemuk secara social artinya perbedaan dalam pekerjaan atau profesi seperti petani, pedagang, guru, pengusaha, militer, nelayan, alim ulama, pegawai negeri dan lain sebagainya. Kemajemukan cultural sering memicu timbulnya konflik, karena masing-masing unsure

---

<sup>22</sup> Badruddin, Syamsiah, Et Al. *Pengantar Sosiologi*. Zahir Publishing, 2024.

memiliki karakteristik sendiri dan masing-masing menghayati karakteristiknya berusaha mempertahankan karakternya.<sup>23</sup>

Kemajemukan vertical, artinya dalam struktur masyarakat itu terdapat polarisasi berdasarkan kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Bisa memicu timbulnya konflik karena sekelompok kecil dalam masyarakat memiliki kekayaan dan pendidikan yang mapan dan bagus, memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam masyarakat. Sedangkan disisi lain ada sebagian besar kelompok yang tidak memiliki semuanya, seperti terjadi ketimpangan diantara kedua kelompok. Pada intinya terjadi ketidak merataan distribusi sumber-sumber nilai dalam masyarakat.

Konflik gender, merupakan konflik yang terjadi antara dua penganut pandangan yang didasari oleh perbedaan jenis kelamin. Berbicara mengenai gender pasti akan merujuk pada aspek perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Tetapi sebenarnya gender lebih mengarah pada status dan peranan manusia yang dilihat dari jenis kelaminnya. Di masyarakat tradisional istilah gender tidak memunculkan suatu permasalahan karena masyarakat tradisional menerima apa adanya apa yang sudah menjadi kebiasaan bahwa lakilaki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding perempuan. Berbeda dengan masyarakat tradisional, masyarakat modern mempermasalahkan kedudukan atau posisi antara laki-laki dan perempuan. Kaum feminis yang terus memperjuangkan kedudukan perempuan agar sejajar atau bahkan menjadi diatas laki-laki.

---

<sup>23</sup> Liata, Nofal, And Khairil Fazal. "Multikultural Dalam Perspektif Sosiologis." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1.2 (2021): 188-201.

Dalam kerangka teori konflik, sistem ekonomi bukanlah struktur yang netral, melainkan arena pertarungan antara kelompok yang memiliki dan tidak memiliki sumber daya. Ketimpangan ekonomi menciptakan relasi kuasa, dan salah satu bentuk utamanya adalah ketimpangan gender dalam akses dan kontrol terhadap ekonomi. Teori konflik melihat bahwa patriarki dan kapitalisme saling memperkuat dalam menjaga dominasi laki-laki atas perempuan, terutama dalam hal distribusi kekayaan, kerja, dan kontrol sumber daya. Ekonomi, dalam teori konflik, adalah medan utama ketimpangan gender. Sistem patriarki dan kapitalisme sering kali saling mendukung dalam membatasi akses perempuan terhadap sumber daya dan pengaruh ekonomi. Namun, melalui akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, dan aset, perempuan dapat memperkuat posisi sosial dan menciptakan relasi yang lebih setara dalam rumah tangga maupun masyarakat. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi tidak hanya menuntut kesempatan yang sama, tetapi juga redistribusi kekuasaan dan pengakuan atas kerja perempuan baik di ruang publik maupun domestik. Contoh kasus yaitu seorang istri Bugis bekerja sebagai guru dan berkontribusi terhadap keuangan keluarga. Namun, semua keputusan besar (pembelian tanah, investasi, warisan) tetap diputuskan oleh suaminya karena dianggap sebagai kepala keluarga menurut adat.

## **2. Teori Feminisme**

Teori feminisme merupakan suatu pendekatan kritis dalam kajian ilmu sosial yang berfokus pada pemahaman, kritik, dan transformasi atas ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Muncul sebagai respons terhadap

dominasi sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan, feminisme berupaya untuk mengangkat suara dan pengalaman perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam sejarah, budaya, politik, ekonomi, dan institusi sosial lainnya.<sup>24</sup>

Teori feminisme secara umum adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan. Beberapa ahli dan tokoh feminis memberikan definisi dan pemahaman yang berbeda, namun semuanya berfokus pada mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dialami perempuan. Secara umum, teori feminisme menawarkan perspektif kritis terhadap masyarakat dan sistem sosial yang menindas perempuan, serta mendorong perempuan untuk berjuang untuk kesetaraan dan keadilan.<sup>25</sup>

Feminisme (tokohnya disebut Feminis) adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Itu sebabnya, tidak ada abstraksi pengertian secara spesifik atas pengaplikasian feminisme bagi seluruh perempuan sepanjang masa. Pada tahun 1960-an seperti Simone de Beauvoir dan Betty Friedan para feminis berusaha untuk melihat wacana patriarkhal yang tampil agresif terhadap perempuan atau sebaliknya justru tidak memasukkan persoalan-persoalan perempuan di dalamnya. Dari sana kemudian,

---

<sup>24</sup> Hidir, Achmad, And Rahman Malik. *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

<sup>25</sup> Hidir, Achmad, And Rahman Malik. *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

dalam perkembangan teori feminis, ciri-ciri umum selanjutnya adalah upaya-upaya untuk memasukkan, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Perempuan dan feminitas menjadi obyek teori dan penelitian yang luas.
- 2) Perempuan dan feminitas yang telah sekian lama diabaikan dalam teori tradisional kini dikonsepsikan sebagai setara dengan penelitian-penelitian seperti kajian sosial ekonomi.
- 3) Wacana patriarkhal sendiri mendapat kritik yang tajam, dan pada saat bersamaan sebagai tangga
- 4) Upaya-upaya untuk membuat kerangka kerja teori wacana feminis secara ontologis, epistemologi dan juga politis.
- 5) Teori feminis ingin melihat pendekatan wacana patriarkhal melalui pengkaitannya dengan permasalahan perempuan, dan juga permasalahan yang lebih “luas” atau “publik”.
- 6) Wacana dikotomis either/or yang selama ini sering digunakan harus ditolak atau diadakan penyesuaian.

Isu-isu perempuan yang diformulasikan oleh teori-teori feminisme menjadi tiga bagian besar teori, yakni gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang ketiga feminisme. Pengkategorian tiga gelombang besar feminisme pertama-tama dilakukan oleh Rosemarie Tong, seorang feminis yang telah menghasilkan buku-buku teori feminisme antara lain bukunya terkenal adalah *Feminist Thought* (1990).

---

<sup>26</sup> Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Garudhawaca, 2016.

Feminisme tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai aliran yang memiliki perspektif dan fokus berbeda, yaitu:<sup>27</sup>

1. Feminisme liberal menekankan pada kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik, seperti pendidikan, pekerjaan, dan hukum. Feminisme Liberal ialah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Alison Jaggar dalam bukunya *Feminist Politics and Human Nature*, mengemukakan bahwa dalam pemikiran kaum liberal, sifat asariah manusia yang unik adalah kemampuan rasionalitasnya. Namun argumen klasik Aristoteles bahwa manusia adalah animal rationale (binatang yang berasio) maka kaum liberal mendefinisikan rasionalitas dalam berbagai aspek termasuk penekanan terhadap moralitas dan kebijaksanaan.<sup>28</sup> Setiap manusia demikian menurut mereka punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka "persaingan bebas" dan punya kedudukan setara dengan lelaki.

Feminis Liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari

---

<sup>27</sup> Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Garudhawaca, 2016.

<sup>28</sup> Feminisme, Gender. "Gender Dan Feminisme: Sebuah Kajian Dari Perspektif Ajaran Islam Gender And Feminism: A Research From The Perspective Of Islamic Studies Dadang Jaya." (2019).

bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, yang terefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat “maskulin”, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cenderung berada “di dalam” negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminist Liberal mengenai “kesetaraan” setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan “pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara.”<sup>29</sup>

2. Feminisme radikal lebih menyoroti akar ketimpangan yang terletak pada struktur patriarki itu sendiri, dan menyerukan perubahan sistemik yang mendalam. Feminisme radikal adalah salah satu cabang pemikiran feminisme yang paling tajam dan transformatif dalam mengkritik akar dari ketimpangan gender. Tokoh-tokoh feminisme radikal seperti Andrea Dworkin, Catharine MacKinnon, dan Shulamith Firestone berperan besar dalam mengembangkan pemikiran bahwa perempuan harus membebaskan diri dari sistem yang telah mengakar dalam setiap aspek kehidupan. Berbeda dari feminisme liberal yang menuntut kesetaraan dalam kerangka sistem yang ada, feminisme radikal memandang bahwa

---

<sup>29</sup> Rilla Sovitriana, Psikolog. *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*. Uwais Inspirasi Indonesia.

ketidaksetaraan gender tidak dapat diatasi hanya dengan reformasi, melainkan memerlukan perubahan mendasar terhadap struktur sosial, politik, dan budaya yang menopang sistem patriarki. Feminisme radikal berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan bukan sekadar akibat dari diskriminasi individual atau kebijakan yang tidak adil, melainkan berasal dari sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kelas yang berkuasa atas perempuan.<sup>30</sup> Dalam pandangan ini, dominasi laki-laki tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, institusi agama, hukum, hingga tubuh dan seksualitas perempuan. Oleh karena itu, feminisme radikal menyoroti kontrol terhadap tubuh perempuan, termasuk isu pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, dan hak atas reproduksi, sebagai bentuk paling nyata dari kekuasaan patriarki. Mereka menegaskan bahwa perubahan sejati tidak cukup hanya mengikutsertakan perempuan dalam struktur yang ada, tetapi harus membongkar struktur tersebut dan membangun relasi yang lebih setara dan bebas dari dominasi.

Feminisme radikal juga memperkenalkan ide bahwa “yang pribadi adalah politis” – sebuah pernyataan penting yang menunjukkan bahwa pengalaman pribadi perempuan, seperti peran dalam rumah tangga atau relasi seksual, tidak lepas dari kekuasaan dan politik patriarki. Dengan mengangkat pengalaman sehari-hari perempuan sebagai bahan analisis politik, feminisme radikal menantang batas antara ruang privat dan publik. Meskipun sering menuai kontroversi karena gagasannya yang

---

<sup>30</sup> Rauf, Abdur, Amalia Desy Wahyuni, And Zafilul Umam. *Refleksi Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam (Masa Klasik Dan Khulafaur Rasyidin)*. Penerbit Kbm Indonesia, 2025.

radikal dan konfrontatif, feminisme radikal telah memberikan sumbangan besar dalam membuka kesadaran masyarakat tentang betapa dalamnya akar penindasan gender. Melalui keberaniannya untuk mempertanyakan fondasi kehidupan sosial itu sendiri, feminisme radikal mengajak kita untuk tidak hanya menuntut kesetaraan, tetapi juga merevolusi cara kita memahami kekuasaan, tubuh, dan kebebasan.<sup>31</sup>

3. Feminisme sosialis dan feminisme Marxis mengaitkan penindasan perempuan dengan sistem kapitalisme dan kelas sosial. Dua tokoh penting yang menjadi fondasi aliran ini adalah Karl Marx dan Friedrich Engels, khususnya melalui karya Engels *The Origin of the Family, Private Property, and the State*. Dalam feminis kontemporer, Heidi Hartmann dan Sylvia Walby merupakan tokoh utama yang menjembatani teori patriarki dan kapitalisme. Dalam perkembangan lebih lanjut, muncul feminisme postmodern dan feminisme interseksional, yang menekankan pentingnya memperhatikan identitas ganda seperti ras, kelas, etnisitas, dan orientasi seksual dalam menganalisis pengalaman perempuan. Feminisme sosialis dan feminisme Marxis merupakan dua cabang pemikiran feminisme yang memusatkan perhatian pada hubungan antara patriarki dan sistem ekonomi, khususnya kapitalisme.<sup>32</sup> Kedua pendekatan ini menekankan bahwa penindasan terhadap perempuan tidak hanya bersumber dari relasi gender, tetapi juga dari struktur kelas dan eksploitasi ekonomi yang saling memperkuat. Feminisme Marxis berakar

---

<sup>31</sup> Amalia, Yusrotul. *Representasi Feminim Dan Maskulin Pada Karakter Tokoh Iteung Dalam Film "Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas" Menurut Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure*. Diss. Iain Kediri, 2024.

<sup>32</sup> Dalimoenthe, Ikhlasih. *Sosiologi Gender*. Bumi Aksara, 2021.

pada teori Karl Marx dan Friedrich Engels, yang menafsirkan sejarah sebagai perjuangan kelas. Dalam kerangka ini, feminis Marxis melihat perempuan sebagai bagian dari kelas proletariat yang mengalami penindasan ganda: sebagai pekerja dalam sistem kapitalis dan sebagai perempuan dalam sistem patriarki. Engels, dalam karyanya *The Origin of the Family, Private Property, and the State*, menyatakan bahwa penindasan terhadap perempuan bermula dari munculnya kepemilikan pribadi dan institusi keluarga patriarkal. Oleh karena itu, bagi feminisme Marxis, pembebasan perempuan tidak bisa terlepas dari penghapusan sistem kapitalisme itu sendiri.<sup>33</sup>

Feminisme sosialis, meskipun juga dipengaruhi oleh Marxisme, mencoba untuk memperluas analisis dengan menggabungkan kritik terhadap patriarki dan kapitalisme secara bersamaan. Feminis sosialis menekankan bahwa patriarki memiliki bentuk dan kekuatan tersendiri, yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan hanya melalui analisis kelas. Mereka melihat bahwa perempuan tidak hanya dieksploitasi sebagai tenaga kerja murah, tetapi juga melalui peran domestik mereka yang tidak dibayar namun menopang ekonomi kapitalis seperti merawat anak, memasak, dan menjaga rumah tangga.<sup>34</sup> Aktivitas ini, meskipun tidak masuk dalam sistem upah, dianggap sebagai kerja reproduktif yang vital bagi kelangsungan kapitalisme. Tokoh-tokoh feminisme sosialis seperti Heidi Hartmann dan Sylvia Walby berupaya menjembatani pemikiran feminisme radikal dan Marxis dengan menekankan bahwa patriarki dan

---

<sup>33</sup> Aizid, Rizem. *Pengantar Feminisme*. Anak Hebat Indonesia, 2024.

<sup>34</sup> Aizid, Rizem. *Pengantar Feminisme*. Anak Hebat Indonesia, 2024.

kapitalisme adalah dua sistem penindasan yang saling memperkuat, dan karena itu harus diperjuangkan secara bersamaan. Feminisme sosialis dan Marxis memperluas cakrawala feminisme dengan menunjukkan bahwa perjuangan perempuan tidak hanya terkait dengan hak-hak gender, tetapi juga dengan keadilan ekonomi dan pembebasan kelas. Kedua pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam bahwa sistem penindasan bersifat kompleks, saling berlapis, dan tidak bisa diselesaikan secara terpisah.

Feminisme bukan semata perjuangan perempuan untuk perempuan, tetapi merupakan perjuangan bersama menuju dunia yang lebih adil dan setara bagi semua manusia. Melalui kritik terhadap ketimpangan struktural, feminisme mengajak masyarakat untuk melihat bahwa ketidaksetaraan gender bukanlah kodrat, melainkan konstruksi sosial yang dapat diubah. Dalam konteks ini, feminisme menjadi alat analisis sekaligus gerakan sosial yang mengusung nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesetaraan gender.

### **C. Tinjauan Konseptual**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

#### **1. Kesetaraan Gender**

Kesetaraan gender merupakan suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki akses, kesempatan, dan kontrol yang sama terhadap sumber daya serta partisipasi yang setara dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kesetaraan gender dipahami tidak semata-mata

sebagai persamaan peran biologis, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang membentuk perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.<sup>35</sup> Gender, dengan demikian, bukanlah kodrat, tetapi produk budaya yang dapat berubah sesuai dengan dinamika sosial masyarakat. Kesetaraan gender bertujuan menghapus diskriminasi yang menyebabkan perempuan termarginalkan, baik dalam ruang domestik maupun publik. Dalam masyarakat Bugis, kesetaraan gender seringkali terhambat oleh sistem patriarki yang masih kuat, di mana laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam lingkup keluarga dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami kesetaraan gender sebagai suatu konsep yang mendorong keadilan relasi dan pembagian peran yang tidak didasarkan pada stereotip gender, melainkan pada kesepakatan dan kemampuan.<sup>36</sup> Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran laki-laki dan perempuan secara mutlak, tetapi menghilangkan hambatan struktural yang mencegah keduanya menjalankan perannya secara adil dan bermartabat.

## 2. Konsep Budaya Masyarakat Bugis

Budaya masyarakat Bugis merupakan sistem nilai dan norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai utama dalam budaya Bugis meliputi *sipakatau* (saling memanusiaikan), *sipakalebbi* (saling menghormati), dan *sipakainge* (saling mengingatkan), yang membentuk karakter sosial masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas dan kehormatan<sup>37</sup> Selain itu, konsep *siri*

<sup>35</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Hlm. . 12.

<sup>36</sup> Hilary M. Lips, *Gender: The Basics* (Taylor & Francis, 2018) <[https://www.google.co.id/books/edition/Gender\\_The\\_Basics/PZFoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Gender_The_Basics/PZFoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)>.

<sup>37</sup> Andi Sulkarnaen, 'Kelanjutan Tradisi Lisan Maddoja Bine Dalam Konteks Perubahan Sosial Masyarakat Bugis', *Masyarakat Indonesia*, 43.2 (2018), pp. 269–83.

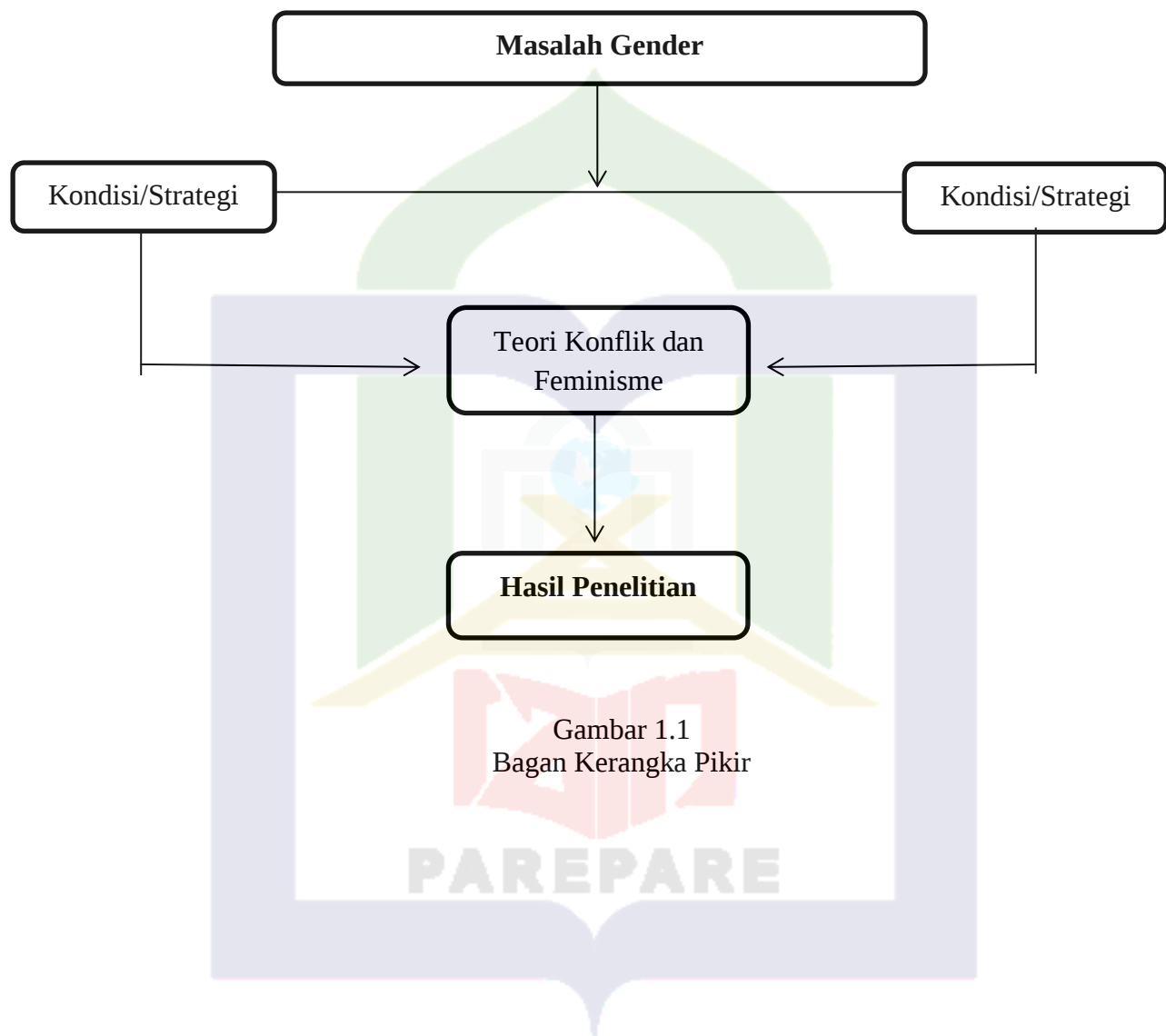
(harga diri) dan *pessae* (rasa malu) memainkan peran penting dalam mengatur relasi sosial, termasuk dalam menentukan peran gender. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai ini seringkali dimaknai secara patriarkal, sehingga menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, terutama dalam ranah domestik. Struktur sosial masyarakat Bugis cenderung memberi peran dominan kepada laki-laki, baik dalam rumah tangga maupun komunitas, dengan dalih menjaga kehormatan keluarga. Hal ini menyebabkan perempuan lebih banyak dibatasi ruang geraknya, meskipun secara budaya, perempuan juga memiliki ruang simbolik yang kuat, seperti yang tercermin dalam teks *La Galigo*. Dengan demikian, budaya Bugis sebenarnya menyimpan potensi nilai-nilai kesetaraan jika dimaknai ulang secara progresif. Reinterpretasi budaya lokal secara kritis dapat menjadi jembatan antara pelestarian nilai adat dan pencapaian keadilan gender.

Berdasarkan diatas pengertian yang dijelaskan secara konseptual yang dimaksud dalam judul ini adalah Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Bugis pada Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Pinrang. Peneliti akan melihat bagaimana kesetaraan gender dalam masyarakat Bugis terutama Kelurahan Tatae, mulai dari pemahaman serta cara pandang agar mampu mewujudkan kesetaraan gender sehingga menjadi harmonis lagi.

#### **D. Kerangka Pikir**

Bagian kerangka berpikir memuat gambaran dalam pola dan skema terkait dengan fokus penelitian peneliti dengan mengacu pada latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Kerangka pikir merupakan gambaran sebuah model berupa konsep

yang menjelaskan hubungan antara variable yang satu dengan variabel lain.<sup>38</sup> Adapun yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 1.1  
Bagan Kerangka Pikir

<sup>38</sup> Muhammad Kamal Zubair, Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, (2020), H.21.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

#### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam buku metodologi penelitian karya Sugiyono, pendekatan penelitian dijelaskan sebagai cara umum dalam memahami dan menganalisis suatu fenomena sosial atau ilmiah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena sosial secara holistik dan mendalam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif.<sup>39</sup> Metode pendekatan yang digunakan yakni spesifik feminis, yaitu mengutamakan suara perempuan dan kelompok marjinal.

#### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (studi kasus). Studi kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu kasus secara mendalam dan menyeluruh, dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini tidak berusaha menggeneralisasi, tetapi lebih pada eksplorasi mendalam terhadap satu atau beberapa kasus yang unik dan kompleks.

Menurut Lexy J. Moleong, studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, memahami, dan menguraikan secara rinci suatu fenomena sosial atau unit tertentu seperti individu, kelompok, organisasi, atau program. Studi ini bersifat deskriptif, eksploratif, dan interpretatif.<sup>40</sup> Sugiyono juga menjelaskan bahwa studi kasus bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 6–10.

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 61.

mendalam terhadap objek tertentu dalam batas waktu dan konteks tertentu. Studi kasus dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi data.<sup>41</sup>

Peneliti melakukan pada masyarakat Pinrang tepatnya pada Kelurahan Tatae desa Tatae. Peneliti ini melakukan dengan data-data yang ada di lapangan mengenai hal-hal yang ingin diteliti, yaitu menganalisis Kesenjangan Gender dalam Masyarakat Bugis (studi kasus Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang), peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif karena data yang akan diperoleh berasal dari penelitian lapangan yang akan dikumpulkan lewat naskah wawancara serta observasi sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah deskripsikan realitas dibalik fenomena secara dalam.

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian di Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena wilayah ini masih kental dengan budaya Bugis yang memengaruhi struktur dan hubungan gender masyarakatnya.

### **2. Waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, selang waktu yang dilakukan peneliti dalam penyusunan penelitian ini, menggunakan waktu kurang lebih 2 bulan.

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 155.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada masyarakat Bugis yang berada di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tentang kesetaraan gender pada masyarakat Bugis. Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif agar lebih mengetahui pemahaman seseorang dalam melihat gender dalam masyarakat Tatae.

### D. Sumber Data

Data kualitatif diperoleh melalui berbagai cara seperti wawancara, observasi serta pemeriksaan catatan dan sudut pandang ketika berada di lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk melihat dan mengungkapkan suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman tentang suatu yang diteliti.<sup>42</sup> Peneliti mengumpulkan riset memakai sumber primer dan sumber sekunder melalui sumber tersebut maka data akan diperoleh.

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari hasil wawancara dengan mengumpulkan informasi dari objek serta observasi langsung pada tempat penelitian sehingga menjadi data informan. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>43</sup>

#### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber kepada data-data yang sudah ada. Data yang sudah ada tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber diperoleh dari berbagai dokumen, buku, laporan maupun jurnal.

---

<sup>42</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta ; Kencana, (2017) , H. 43.

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), H.132.

### E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang didapat oleh peneliti terutama penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data-data yang konkret dengan cara khas kualitatif yaitu observasi, wawancara, dokumentasi pribadi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informasi. Akan tetapi yang paling umum yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengamatan (Observasi )

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap apa yang diteliti. Observasi merupakan satu teknik pengumpulan data (1) sesuai dengan tujuan penelitian, (2) direncanakan dan dicatat, (3) dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).<sup>44</sup> Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung lapangan atau tempat meneliti untuk melakukan pengamatan real dengan mewawancarai masyarakat Tatae, Lurah Kelurahan serta tokoh masyarakat.

#### 2. Wawancara (*interview*)

Mendapatkan data juga diperlukan wawancara yaitu merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Gunanya langsung mendapatkan data dari tangan pertama (*primer*), pelengkap teknik yang lainnya, menguji hasil pengumpulan lainnya.<sup>45</sup> Dalam teknik juga wawancara juga menggunakan berbagai alat seperti gawai yang berfungsi sebagai merekam aktivitas wawancara sebagai bukti pada saat melakukan penelitian. Adapun profil informannya, sebagai berikut :

---

<sup>44</sup> Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 1996), H.54.

<sup>45</sup> Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet II; Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2008), H.55.

Tabel 3.1 Profil Informan

| No | Nama Informan | Jenis Kelamin | Usia (Tahun) | Pekerjaan                         | Pendidikan     | Status Perkawinan |
|----|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 1  | Mia           | Perempuan     | 40-an        | Ibu rumah tangga & jualan kue     | Tidak tamat SD | Menikah           |
| 2  | Abd. Rachman  | Laki-laki     | 60-an        | Pensiunan tentara                 | SMA            | Menikah           |
| 3  | Nadira        | Perempuan     | 30-an        | Ibu rumah tangga                  | SMP            | Menikah           |
| 4  | Hj. Larang    | Perempuan     | 50-an        | Pedagang (jual emas, sembako)     | SD             | Menikah           |
| 5  | Tasia         | Perempuan     | 30-an        | Wiraswasta kecil                  | SMA            | Menikah           |
| 6  | Rusdi         | Laki-laki     | 50-an        | Petani                            | SD             | Menikah           |
| 7  | Basri         | Laki-laki     | 40-an        | Buruh tani                        | SMP            | Menikah           |
| 8  | Siti          | Perempuan     | 40-an        | Pegawai warung & ibu rumah tangga | SMA            | Menikah           |
| 9  | Hasanah       | Perempuan     | 30-an        | Penjual gorengan                  | SMP            | Menikah           |
| 10 | Asri          | Laki-laki     | 40-an        | Nelayan                           | SMA            | Menikah           |

### 3. Dokumentasi

Data-data yang diambil pada saat wawancara maupun observasi awal berupa, kata-kata, gambaran dan bukan angka sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari wawancara. Catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi dan dokumen resmi. Demikian hasil data yang disajikan asli akan datanya mungkin. Selain itu, peneliti juga menggunakan data tertulis yang bersifat dokumen serta kamera digital untuk mengambil gambar sebagai dokumentasi untuk dijadikan bukti hasil wawancara.

## F. Uji Keabsahan Data

Dalam uji keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validasi internal), *transferrability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Dimana kriteria uji keabsahan tersebut mampu dijadikan tolak ukur untuk bisa mendapatkan kesimpulan yang menjamin kevalidan sebuah data diperoleh peneliti.

### 1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Kepercayaan yang digunakan peneliti dapat menjelaskan sebuah data dan mampu membuktikan hasil pengamatan dan realitas di lapangan, apakah data atau informasi yang didapatkan sesuai dengan di lapangan.

### 2. Kebergantungan (*Dependability*)

*Dependability* merupakan kriteria dalam menilai sebuah proses penelitian bermutu atau tidak. Proses ini mampu menjamin penemuan penelitian bisa untuk dipertahankan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Kepastian (*Confirmability*)

*Konfirmability* merupakan kriteria penelitian untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan melihat data dan informasi serta interpretasi yang didukung oleh materi yang ada pada penelusuran dan pelacakan.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelolah data peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, dengan menggambarkan kata-kata dari hasil yang diperoleh.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dalam urutan data ke pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan

hipotesis seperti yang diinginkan oleh data.<sup>46</sup> Data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang lain mampu meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan agar dapat dipaparkan temuan kepada orang lain. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, yang dimana data didapatkan lalu diuraikan dalam kata-kata yang menarik bersifat khusus.

Menurut Miles dan Hubernas ada tiga metode yang dapat digunakan dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi yang dapat menjadi kesimpulan sebagai berikut.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Teknik dalam reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan pentransformasian data kasar dari lapangan yang dimana berlangsung dari awal penelitian. Tahap reduksi ini bertujuan melihat relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir dan penyajian data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antara bagian-bagian dalam konteks utuh.

2. Penyajian data (*Display Data*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang akan memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan, melalui penyusunan ini dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Dengan menampilkan data maka akan memudahkan untuk memahami, apa yang

---

<sup>46</sup>Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2008), H.91.

terjadi dalam merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang ingin dipahami tersebut.<sup>47</sup>

### 3. Kesimpulan dan verifikasi

Dalam menarik kesimpulan dan verifikasi data yaitu penentuan data akhir dari keseluruhan proses tahap analisis, sehingga keseluruhan mendapat data akhir sesuai dengan kategori dan permasalahannya. Pada akhir ini akan muncul kesimpulan- kesimpulan yang mendalam secara komprehensif dari data hasil penelitian. Selain itu penarikan kesimpulan hanya sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016). H.337.

<sup>48</sup> Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, H.209-210.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Informan**

Informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari lima laki-laki dan lima perempuan yang berdomisili di Kelurahan Tatae. Usia para informan bervariasi antara 30 hingga 70 tahun, dengan sebagian besar berada dalam rentang usia produktif. Informan perempuan umumnya merupakan ibu rumah tangga atau pelaku usaha kecil seperti penjual makanan, sedangkan informan laki-laki bekerja sebagai petani, nelayan, pensiunan tentara, atau buruh harian. Tingkat pendidikan para informan juga beragam, mulai dari tidak tamat sekolah dasar hingga lulusan sekolah menengah atas. Beberapa informan perempuan tidak mengenyam pendidikan formal, sementara sebagian laki-laki hanya menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah.

Meskipun demikian, semua informan memiliki kemampuan berkomunikasi yang cukup dalam menyampaikan pengalaman mereka selama wawancara. Seluruh informan telah menikah dan tinggal bersama pasangan masing-masing, kecuali satu orang yang telah menjanda. Informan laki-laki cenderung menganggap dirinya sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan utama dalam rumah tangga. Sebaliknya, informan perempuan mengaku berperan aktif dalam mengelola kebutuhan rumah tangga dan pengasuhan anak. Sebagian informan perempuan turut bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga, baik secara tetap maupun tidak tetap. Namun demikian, mereka tetap memikul tanggung jawab domestik secara penuh. Mayoritas informan berasal dari latar belakang budaya Bugis yang masih memegang nilai-nilai tradisional. Norma budaya tersebut terlihat dalam pembagian peran yang

tegas antara laki-laki dan perempuan, baik dalam urusan rumah tangga maupun sosial. Beberapa informan menyebutkan bahwa nilai-nilai seperti siri' (harga diri) masih memengaruhi cara mereka bersikap terhadap pasangan dan lingkungan sosial. Tingkat keterlibatan informan dalam kegiatan masyarakat juga bervariasi, tergantung pada usia dan g terlibat dalam arisan atau kelompok pengajian. Dari segi penghasilan, mayoritas informan mengandalkan pekerjaan informal dan penghasilan harian yang tidak tetap. Hal ini membuat sebagian besar keluarga informan berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kendati demikian, seluruh informan menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif selama proses wawancara berlangsung.

Secara umum, komposisi informan mencerminkan keragaman sosial-ekonomi masyarakat Bugis di Kelurahan Tatae, khususnya dalam konteks relasi gender dan dinamika rumah tangga. Perbedaan usia memberikan spektrum pandangan yang luas mengenai pemaknaan kesetaraan gender antar generasi. Informan yang lebih tua cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional, sementara informan yang lebih muda mulai membuka ruang bagi negosiasi peran dalam keluarga. Tingkat pendidikan turut memengaruhi cara berpikir dan sikap terhadap pembagian peran gender. Informan dengan latar pendidikan lebih tinggi cenderung lebih reflektif terhadap ketimpangan peran dan lebih terbuka pada pembagian tanggung jawab yang seimbang. Nampekerjaan mereka. Informan laki-laki lebih banyak terlibat dalam forum-forum sosial atau keagamaan, sedangkan informan perempuan lebih serinun demikian, baik laki-laki maupun perempuan pada umumnya masih menempatkan suami sebagai pemegang kendali utama dalam keluarga. Beberapa informan mengaku bahwa kendali tersebut sudah menjadi kebiasaan atau warisan budaya. Informan perempuan yang berpenghasilan lebih besar tetap merasa perlu tunduk pada keputusan suami demi

menjaga keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, ada pula informan laki-laki yang mengakui peran strategis istri dalam mengelola keuangan dan pengambilan keputusan praktis. Pola hubungan antara suami dan istri tampak fleksibel di lapangan, namun tetap dibingkai oleh norma-norma adat dan agama. Hubungan ini tidak sepenuhnya timpang, namun juga belum mencerminkan kesetaraan yang ideal. Variasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis sedang berada dalam proses pergeseran nilai antara tradisi dan modernitas. Kendati proses negosiasi peran terus berlangsung, pembagian kerja domestik dan publik masih menunjukkan ketimpangan. Mayoritas informan tetap menganggap perempuan sebagai penanggung jawab utama rumah tangga, sekalipun turut mencari nafkah. Keadaan ini menimbulkan beban ganda bagi perempuan yang bekerja. Namun, tidak sedikit pula istri yang memilih bekerja sebagai bentuk aktualisasi diri dan untuk menopang keuangan keluarga. Dengan demikian, profil informan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana struktur sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya membentuk persepsi dan praktik kesetaraan gender di tingkat rumah tangga masyarakat Bugis Kelurahan Tatae.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pemahaman Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Bugis**

Memaknai perbedaan peran suami-istri dalam kehidupan keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 5 pandangan umum tentang Peran Laki-laki dan Perempuan, yaitu pengambilan keputusan bersama (musyawarah) peran laki-laki dan perempuan, dominasi suami dalam pengambilan keputusan, konflik akibat perbedaan pendapat, kesadaran akan kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan penyerahan keputusan kepada anak-anak.

Pada aspek pengambilan keputusan bersama (Musyawarah) Peran Laki-laki dan Perempuan, terdapat 3 informan masuk dalam kategori aspek ini. Berikut hasil wawancara dari para informan, antara lain:  
 “Kalau ada beda pendapat, kami biasa duduk sama-sama dulu. Kalau sudah dibicarakan baik-baik biasanya bisa sepakat”<sup>49</sup>

Adapun menurut pak Basri bahwa:

“Kadang saya salah juga kalau ambil keputusan sendiri, jadi lebih baik diskusi dulu sama istri”<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Ibu Tasia bahwa:

“Kalau soal anak atau belanja besar biasanya dibicarakan dulu. Tapi kalau saya tidak setuju, saya bilang juga”<sup>51</sup>

Pada aspek dominasi Suami dalam Pengambilan Keputusan, terdapat 3 informan menggambarkan masih kuatnya dominasi suami dalam keputusan keluarga, meski kadang tetap mendengar pendapat istri. Berikut di bawah ini hasil wawancara dari para informan, antara lain:

“Saya tetap tanya juga istri, tapi kalau menurut saya tidak cocok ya tetap saya yang ambil keputusan terakhir”<sup>52</sup>

“Kadang kita juga tidak diajak bicara dulu, tiba-tiba sudah ada keputusan. Kalau saya tidak setuju, biasanya ribut baru selesai”<sup>53</sup>

“Kadang-kadang kalau saya punya pendapat beda, suami bilang itu bukan urusan saya. Tapi saya tetap bicara karena saya juga punya hak dalam rumah tangga ini”<sup>54</sup>

<sup>49</sup> Rachman, wawancara, Kabupaten Pinrang 21 Juni 2024.

<sup>50</sup> Basri, wawancara, Kabupaten Pinrang 23 Juni 2024.

<sup>51</sup> Tasia, wawancara, Kabupaten Pinrang 22 Juni 2024.

<sup>52</sup> Rusdi, wawancara, Kabupaten Pinrang 23 Juni 2024.

<sup>53</sup> Hj. Larang, wawancara, Kabupaten Pinrang 22 Juni 2024.

<sup>54</sup> Nadira, wawancara, Kabupaten Pinrang 21 Juni 2024.

Pada aspek dominasi Konflik rumah tangga kerap terjadi karena ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan, terutama antara suami dan istri, terdapat 3 informan, yaitu berikut hasil wawancaranya:

“Terserah bagaimana anak-anak saja, nanti kita sebagai orang tua ikut saja karena kita tidak bisa paksa kemauan anak-anak. Kemudian sering juga terjadi perbedaan pendapat”<sup>55</sup>

“Saya kadang mau A, suami mau B. Tapi saya tidak bisa diam saja. Kalau saya rasa penting, saya tetap lawan”<sup>56</sup>

“Kalau suami tidak dengar saya, saya tetap bilang karena saya yang lebih tahu anak-anak. Kalau tidak didengar, pasti ribut”<sup>57</sup>

Pada aspek Penyerahan Keputusan kepada Anak-anak, dalam hal tertentu, keputusan keluarga juga melibatkan anak-anak, terutama pada hal yang menyangkut masa depan mereka sendiri. terdapat 3 informan, yaitu berikut hasil wawancaranya:

“Terserah bagaimana anak-anak saja, nanti kita sebagai orang tua ikut saja karena kita tidak bisa paksa kemauan anak-anak”<sup>58</sup>

Konflik dalam pengambilan keputusan keluarga menciptakan redistribusi peran gender atau memperkuat dominasi salah satu pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 kategori konflik dalam pengambilan keputusan keluarga menciptakan redistribusi peran gender atau memperkuat dominasi salah satu pihak, yaitu informan yang mendukung dominasi laki-laki, informan yang menggambarkan kompromi atau negosiasi dan informan yang menunjukkan perubahan atau resistensi terhadap pola patriarkal.

---

<sup>55</sup> Nurmiati, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 20 Juni 2024.

<sup>56</sup> Murya, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 25 Juni 2024.

<sup>57</sup> Besse, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 25 Juni 2024.

<sup>58</sup> Nurmiati, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 20 Juni 2024.

Dalam kategori dominan patriarki dalam pengambilan keputusan, mayoritas informan menunjukkan bahwa suami masih memegang kendali utama dalam proses pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Nurmiati, misalnya, menyatakan bahwa,

“kalau itu, bapak yang harus buat karena kita mengikut di suami saja... keputusan tentang pernikahan, kalau ibu kembali lagi ke anak-anak ji saja”<sup>59</sup>

Hal ini menggambarkan bahwa perempuan cenderung menempatkan diri sebagai pendukung keputusan suami, bukan sebagai pengambil keputusan. Senada dengan itu, Rusdi menegaskan posisi suami sebagai otoritas tertinggi dalam keluarga, dengan menyatakan,

“kalau laki-laki mi yang tentukan pasti istri ikut biasanya”<sup>60</sup>

Pola seperti ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai patriarkal masih sangat kuat dalam struktur rumah tangga masyarakat Bugis. Sementara itu, terdapat pula kategori peran perempuan yang terbatas pada urusan domestik. Dalam wawancaranya, Hj. Larang menyebut bahwa:

“sebenarnya tidak juga, apa saya yang urus masalah rumah makan, minum nya dan apa yang diperlu dirumah”<sup>61</sup>

Pandangan ini menunjukkan bahwa perempuan masih diarahkan pada peran-peran tradisional yang bersifat teknis dan domestik, tanpa dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis keluarga. Mia juga mengungkapkan sikap pasif dalam ranah keputusan rumah tangga dengan mengatakan:

---

<sup>59</sup> Nurmiati, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 20 Juni 2024.

<sup>60</sup> Rusdi, Nurmiati, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 23 Juni 2024.

<sup>61</sup> Hj. Larang, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 22 Juni 2024.

“iya, saya cuman dibelakang saja mendengar walaupun mauka juga bicara”<sup>62</sup>

Ini menunjukkan adanya pembatasan peran perempuan secara kultural meski terdapat dorongan dari dalam diri mereka untuk ikut terlibat. Dalam kategori ketegangan antara keinginan perempuan dan struktur patriarkal, Nadira menyoroti dilema yang sering ia hadapi dalam keluarga. Ia mengatakan:

“tergantung bagaimana ka sama suami toh mengambil keputusan e, tapi kalau suami ku ji saja pasti terjadi masalah”<sup>63</sup>

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana perempuan sering kali ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi terhambat oleh realitas budaya yang tidak memberikan ruang partisipasi yang sejajar. Namun demikian, muncul pula kategori kompromi dan negosiasi dalam pengambilan keputusan. Rachman, seorang informan laki-laki, menjelaskan bahwa meskipun peran utama tetap berada pada suami, ada kalanya keputusan penting disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Ia menyatakan,:

“biasa hal begitu terjadi... tapi untuk menghindari konflik saya kasi pegang mi dulu sawah”<sup>64</sup>

Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks, suami bersedia memberikan ruang kepada istri untuk mengambil kendali sebagai bentuk strategi menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kategori lain yang juga muncul adalah konflik akibat ketidakterlibatan perempuan, sebagaimana diutarakan oleh Basri. Meskipun kutipannya tidak ditulis langsung, dalam narasi wawancara disebutkan bahwa Basri menyadari bahwa tidak melibatkan istri dalam keputusan besar bisa menimbulkan konflik, apalagi jika

<sup>62</sup> Nurmiati, wawancara, Kabupaten Pinrang 20 Juni 2024.

<sup>63</sup> Nadira, wawancara, Kabupaten Pinrang 21 Juni 2024.

<sup>64</sup> Rachman, wawancara, Kabupaten Pinrang 21 Juni 2024.

berlawanan dengan harapan keluarga istri. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak semua laki-laki merasa nyaman dengan model keputusan yang sepenuhnya sepihak. Menariknya, dalam wawancara juga ditemukan indikasi resistensi terhadap pola patriarkal. Hj. Larang dalam pernyataan lainnya menjelaskan bahwa dalam rumah tangganya ia memiliki kontrol penuh terhadap banyak urusan:

“semua urusan rumah tangga atau urusan yang lain saya yang atur, suami cuman kerja saja”<sup>65</sup>

Meskipun ini belum menjadi norma umum dalam masyarakat Bugis, pernyataan tersebut mencerminkan adanya dinamika baru di mana perempuan mulai mengambil peran lebih dominan dalam keputusan rumah tangga, terutama ketika mereka memiliki posisi strategis atau kontribusi ekonomi yang signifikan. Kesetaraan dalam pengambilan keputusan, ruang diberikan kepada istri diberi untuk menyampaikan pendapat, terutama dalam hal pendidikan anak, ekonomi, atau kegiatan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 5 kategori konflik dalam pengambilan keputusan keluarga tentang pemahaman mengenai respon anggota keluarga terhadap perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, dan sejauh mana konflik tersebut menghasilkan negosiasi yang setara secara gender, yaitu pelibatan keluarga besar dalam pengambilan keputusan, komunikasi dua arah antara suami istri, konflik sebagai jalan menuju kompromi, tekanan dari keluarga besar dan kesadaran untuk Membangun Komunikasi Yang Lebih Adil.

Berikut hasil wawancara dalam kategori pelibatan keluarga besar dalam pengambilan keputusan, terlihat bahwa bukan hanya suami dan istri yang terlibat, tetapi juga orang tua dan anak-anak dewasa. Mia mengatakan,

---

<sup>65</sup> Hj. Larang, wawancara, Kabupaten Pinrang 22 Juni 2024.

“Kalau saya dan bapaknya biasa saling cerita dulu baru ditentukan mi”<sup>66</sup>

Walau ada diskusi, keputusan akhir biasanya tetap di tangan suami. Rusdi juga menyampaikan:

“selama ini yang biasa merespon itu nenek nya atau mertua ku,”<sup>67</sup>

Tapi keputusan tetap diambil olehnya. Ini menunjukkan bahwa masukan dari keluarga besar tidak mengubah dominasi suami. Kategori komunikasi dua arah antara suami istri, beberapa informan menggambarkan adanya diskusi sebelum keputusan diambil. Nadira mengatakan:

“tapi selalu ji na diskusikan sebelum melakukan sesuatu”<sup>68</sup>

Yang menunjukkan bahwa istri masih diajak bicara walaupun keputusan akhir tetap pada suami. Rachman juga menyebutkan bahwa suara anak-anak dipertimbangkan dalam urusan keluarga:

“anak pertama saya tidak mau juga dan menolak i, tapi anak kedua ku mau kalau digadaikan saja dulu”<sup>69</sup>

Ini menandakan bahwa keputusan kadang dipengaruhi oleh pendapat anak. Kategori konflik sebagai jalan menuju kompromi terlihat saat terjadi perbedaan pendapat dalam keluarga. Hj. Larang mengatakan:

---

<sup>66</sup> Nurmiati, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 20 Juni 2024.

<sup>67</sup> Rusdi, Nurmiati, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 23 Juni 2024.

<sup>68</sup> Nadira, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 21 Juni 2024.

<sup>69</sup> Rachman, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 21 Juni 2024.

“kalau masalah keputusan itu ada ji juga anak ku yang tidak kalau mau renovasi rumah ka,”<sup>70</sup>

Lalu ia memilih berdiskusi untuk mencari jalan tengah. Tasia juga mengalami perbedaan pandangan dengan suami soal pendidikan anak:

“palingan kakak pertama nya sering merespon kalau masalah pendidikan adek-adeknya... biar diizinkan sama puang nya”<sup>71</sup>

Ini menunjukkan bahwa konflik bisa membuka ruang diskusi yang melibatkan anggota keluarga lain. Dalam kategori tekanan dari keluarga **besar**, keputusan pasangan kadang tidak disetujui oleh mertua atau orang tua. Basri menyampaikan,

“kalau biasanya mertua ku yang biasa beda pendapat... misalkan mau kalau anaknya tetap sama dia”<sup>72</sup>

Hal ini bisa membuat suami atau istri sulit membuat keputusan bersama. Nadira juga mengatakan,

“suami yang lebih didengar”<sup>73</sup>

Yang memperlihatkan bahwa suara perempuan belum dianggap setara dalam keluarga. Meski begitu, ada juga kategori kesadaran untuk membangun komunikasi yang lebih adil. Rachman berkata bahwa,

“bisa membuat kita lebih terbuka sama keinginan anggota keluarga”<sup>74</sup>

<sup>70</sup> Hj. Larang, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 22 Juni 2024.

<sup>71</sup> Tasia, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 22 Juni 2024.

<sup>72</sup> Basri, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 23 Juni 2024.

<sup>73</sup> Nadira, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 21 Juni 2024.

<sup>74</sup> Rachman, *wawancara*, Kabupaten Pinrang 21 Juni 2024.

Yang menunjukkan bahwa konflik bisa menjadi awal dari perubahan cara pengambilan keputusan yang lebih terbuka dan melibatkan semua anggota keluarga. Keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan dampaknya terhadap relasi gender, memaknai perempuan yang bekerja tetap memikul beban domestik terhadap relasi gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 kategori konflik dalam konflik peran pencari nafkah antara suami dan istri mempengaruhi pola relasi kekuasaan dalam rumah tangga dalam urusan kerjaan rumah dan kerja luar, yaitu peran ganda perempuan bekerja dan tetap mengurus rumah, penolakan atau pembatasan dari suami terhadap perempuan bekerja, minimnya keterlibatan suami dalam kerja domestik, konflik karena harapan domestik Terhadap Istri. Hasil wawancara sebagai berikut:

Dalam kategori peran ganda perempuan bekerja dan tetap mengurus rumah, beberapa informan perempuan menyampaikan bahwa meskipun mereka bekerja di luar rumah, tanggung jawab domestik tetap menjadi beban utama mereka. Mia menjelaskan,

“tidak ada ji juga yang berubah karna ta tau mi kerja ibu dirumah juga selain itu kerja diluarka juga. Jadi sama ji”<sup>75</sup>

Ia tetap menjalankan tugas rumah meskipun juga bekerja di luar. Tasia juga menyampaikan hal yang sama,

“biasa nya urusan rumah tangga saya atur semua, jadi sebelum ka beraktivitas diluar ku kerjakan dulu kerjaan rumah baru keluar”<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Nurmiati, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>76</sup> Tasia, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

Begitu pula dengan Besse, yang merasa harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah sebelum pergi kerja agar tidak menimbulkan konflik,

“Sebelum ka pergi kerja, harus selesai semua kerjaan rumah... suami tidak biasa bantu kalau ada yang tertinggal, nanti manoko-noko”<sup>77</sup>

Kategori penolakan atau pembatasan dari suami terhadap perempuan bekerja terlihat dalam pernyataan Nadira dan Rusdi. Nadira menyampaikan bahwa keinginannya untuk bekerja sering kali ditolak oleh suaminya,

“tidak masalah ji, tapi saya ji yang bermasalah karena mau ka kerja na larang ka di situ mi biasa berdebat ka”<sup>78</sup>

Rusdi, seorang petani, secara tegas tidak mengizinkan istrinya bekerja di luar rumah:

“tidak saya izinkan, cukup dirumah mengurus anak dan kerja lainya”<sup>79</sup>

Hal ini mencerminkan bahwa masih ada kendali laki-laki atas akses perempuan ke ruang publik. Dalam kategori minimnya keterlibatan suami dalam kerja domestik, ditemukan bahwa laki-laki masih cenderung menghindari tugas rumah tangga. Basri menuturkan bahwa ia tidak nyaman jika diminta menjaga anak:

“sering terjadi kalau saya disuruh menjaga anak ku nah saya tidak bisa... disuruh jaga anak pasti lah saya suruh kembali istriku”<sup>80</sup>

Hasanah juga mengeluhkan sikap suaminya yang tidak mau membantu,

“kalau capek dari luar, kadang tidak sempat ku masak... suami tidak bantu, malah marah”<sup>81</sup>

---

<sup>77</sup> Besse, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>78</sup> Nadira, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>79</sup> Rusdi, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>80</sup> Basri, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>81</sup> Nurmiati, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

Asri mengalami hal yang sama,

“kadang kalau saya keluar kerja, suami tidak mau jaga anak... akhirnya saya juga yang tangani semua”<sup>82</sup>

Hal ini menunjukkan ketimpangan peran di rumah, di mana istri harus menangani semuanya sendiri. Kategori konflik karena harapan domestik terhadap istri juga terlihat dari pengalaman. Hj. Larang. Ia mengatakan:

“Sering terjadi apalagi kalau capek dari jualan biasa tidak kubuatkan suamiku makanan nah biasa juga manoko-noko”<sup>83</sup>

Perempuan tetap dituntut untuk melayani suami meskipun lelah setelah bekerja. Sementara itu, Abd. Rachman menceritakan bahwa dulu sempat marah ketika istrinya tidak menyiapkan sarapan,:

“pernah waktu pas masih awal-awalnya nikah nah lupa sediakan sarapan ku, jadi agak besar ki nada suaraku toh ehh besar pi suaranya”<sup>84</sup>

Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa perempuan dalam keluarga Bugis banyak yang menjalani peran ganda bekerja di luar rumah sekaligus mengurus rumah tangga tanpa pembagian tugas yang adil. Suami cenderung mempertahankan peran tradisional perempuan di ranah domestik, meskipun kondisi ekonomi dan sosial menuntut keterlibatan perempuan di ruang publik.

Mengenai pengelolaan keuangan keluarga menciptakan peluang bagi redistribusi peran ekonomi berbasis kesetaraan gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 10 kategori konflik dalam konflik mengenai pengelolaan keuangan keluarga menciptakan peluang bagi redistribusi peran ekonomi berbasis

---

<sup>82</sup> Rusdi, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>83</sup> Hj. Larang, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>84</sup> Rachman, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

kesetaraan gender, yaitu perempuan ikut menanggung beban ekonomi, beban psikologis pencari nafkah utama, istri sebagai pengatur keuangan namun tetap mengalami konflik, ketidakterbukaan suami soal pendapatan, dominasi suami dalam pengelolaan uang, pengakuan peran istri tapi tetap dikontrol suami, pembatasan akses ekonomi untuk istri, pergeseran pengelolaan ekonomi setelah konflik, ketergantungan ekonomi pada pihak luar dan penyesuaian perempuan terhadap dominasi suami dalam ekonomi.

Dalam kategori perempuan ikut menanggung beban ekonomi, Mia menjelaskan:

“Sering ribut masalah uang ji misalkan mau maki ke pasar tapi tidak ada uang nah kasi ki terpaksa uang jualan kueh-kueh ku pake dulu”<sup>85</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa beban ekonomi keluarga tidak hanya ditanggung oleh suami, tetapi juga istri, walaupun dengan usaha kecil. Kategori beban psikologis pencari nafkah utama terlihat pada pernyataan Abd. Rachman yang merasa tertekan sebagai tulang punggung keluarga. Ia mengatakan,

“Kalau ibu mau ke pasar otomatis minta uang sama saya... biasa juga ada rasa stres, tapi karna saya memang yang bekerja mau tidak mau sabar”<sup>86</sup>

Meskipun ia menerima tanggung jawab itu, tekanan finansial tetap menimbulkan ketegangan. Kategori istri sebagai pengatur keuangan namun tetap mengalami konflik, muncul dalam cerita Nadira. Meskipun ia yang mengatur uang belanja, sering terjadi masalah jika anggaran tidak cukup.

---

<sup>85</sup> Nurmiati, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>86</sup> Rachnan, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

“Urusannya kalau ada uang nah kasi dalam seminggu ada targetnya, jika belum sampai nah habis, pasti biasa manoko-noko suamiku”<sup>87</sup>

Ini menunjukkan bahwa istri tetap rentan disalahkan jika keuangan keluarga tidak berjalan lancar. Dalam kategori ketidakterbukaan suami soal pendapatan, Hj. Larang merasa kecewa karena tidak diberi informasi penuh soal hasil panen. Ia mengatakan,

“Pernah, kalau ada hasil panen tidak semua nah kasika padahal harusnya saya semua nah kasi”<sup>88</sup>

Kurangnya transparansi dalam keuangan keluarga menimbulkan rasa tidak percaya. Tasia juga mengalami dominasi suami dalam pengelolaan uang, meskipun ia juga bekerja. Ia menyatakan:

“Kalau masalah mengelola ini semua ada di suamiku sehingga apa urusan sedikit dia yang tentukan”<sup>89</sup>

Ini menunjukkan bahwa kontrol keuangan tetap dipegang oleh suami, walaupun istri ikut mencari nafkah. Kategori pengakuan peran istri tapi tetap dikontrol suami, terlihat dari pernyataan Rusdi:

“Istri berhak penuh atas pengelolaan uang, tapi kita sebagai suami berhak atas mengatur uang”<sup>90</sup>

Meskipun ada ruang untuk istri mengelola uang, keputusan akhir tetap berada di tangan suami. Basri masuk dalam kategori pembatasan akses ekonomi untuk istri, karena ia merasa istri terlalu banyak ingin membeli sesuatu.

<sup>87</sup> Nadira, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>88</sup> Hj. Larang, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>89</sup> Tasia, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>90</sup> Rusdi, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

“Kalau istri mi kelola uang pasti banyak sekali mau nah beli”<sup>91</sup>

Ia memilih memberi uang belanja seperlunya agar tetap terkontrol. Kategori pergeseran pengelolaan ekonomi setelah konflik, muncul dalam cerita Ahmad mengatakan bahwa:

“Awalnya istri keberatan, tapi karena saya lebih teliti akhirnya dia setuju juga”<sup>92</sup>

Ini menunjukkan adanya negosiasi dan perubahan peran dalam rumah tangga. Andi Besse termasuk dalam kategori ketergantungan ekonomi pada pihak luar, karena saat kondisi mendesak ia harus meminjam uang dari ibunya.

“Biasa ma itu mapinjam sama mamaku nanti kalau sudah panen baru saya dibayar kembali”<sup>93</sup>

Ini menandakan lemahnya keuangan keluarga dan tidak adanya dana darurat. Terakhir, Murya menggambarkan penyesuaian perempuan terhadap dominasi suami dalam ekonomi. Ia berkata,

“Sebenarnya masalah tetapi daripada jadi ribut biar mi saya yang mengalah dulu karna biar bagaimana tetap ji dia kepala keluarga toh”<sup>94</sup>

Meskipun ia mengelola uang, keputusan tetap di tangan suami karena norma yang masih kuat. Kerja di luar rumah memengaruhi status sosial atau posisi tawar perempuan di rumah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 kategori konflik, yaitu peran ganda, keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga, kontrol terhadap keputusan perempuan untuk bekerja, beban fisik dan emosional dan struktur peran gender dalam keluarga masyarakat bugis masih sangat patriarkal.

---

<sup>91</sup> Basri, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>92</sup> Ahmad, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>93</sup> Besse, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>94</sup> Murya, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

Berdasarkan wawancara dengan sepuluh informan, terlihat bahwa sebagian besar perempuan dalam masyarakat Bugis menjalankan peran ganda, yakni bekerja di luar rumah sambil tetap mengurus pekerjaan domestik. Mia, Tasia, Besse, Murya, dan menegaskan bahwa mereka tetap harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah sebelum atau sesudah beraktivitas di luar. Meskipun mereka turut berkontribusi secara ekonomi, tanggung jawab rumah tangga tetap tidak dibagi secara adil. Tasia dan Murya bahkan mengeluhkan bahwa suami mereka tidak mau membantu, padahal mereka juga kelelahan setelah bekerja. Selain itu, keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga cenderung minim. Basri secara jujur mengungkapkan bahwa ia enggan menggantikan peran istri dalam menjaga anak. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kerja domestik masih dianggap sebagai tugas utama perempuan.

Dalam kategori kontrol terhadap keputusan perempuan untuk bekerja, Nadira menyatakan bahwa keinginannya untuk bekerja kerap ditolak oleh suami sehingga terjadi perdebatan. Hal yang sama ditegaskan oleh Rusdi, yang secara tegas tidak mengizinkan istrinya bekerja di luar rumah dan hanya memperbolehkan aktivitas di dalam rumah saja. Hal ini menunjukkan bahwa norma patriarkal masih mengatur ruang gerak perempuan, termasuk dalam mengambil keputusan tentang partisipasi ekonomi.

Konflik juga sering muncul ketika perempuan tidak mampu memenuhi tuntutan domestik karena lelah bekerja. Hj. Larang mengungkapkan bahwa dirinya sering dimarahi suami ketika tidak sempat memasak setelah pulang dari berjualan. Siti juga mengalami tekanan serupa saat ada pekerjaan rumah yang tertinggal, dan suaminya menunjukkan reaksi negatif. Kondisi ini memperlihatkan beban fisik dan emosional yang harus ditanggung perempuan dalam situasi yang tidak setara.

Namun, tidak semua pengalaman bernuansa negatif. Abd. Rachman menceritakan bahwa di awal pernikahan sempat terjadi konflik karena ekspektasi domestik, tetapi seiring berjalannya waktu, ia dan istrinya mulai saling memahami. Ini menunjukkan adanya peluang menuju relasi yang lebih seimbang jika diiringi dengan komunikasi dan pengertian bersama. Secara keseluruhan, wawancara dari sepuluh informan ini mengindikasikan bahwa meskipun perempuan telah berkontribusi secara ekonomi, struktur peran gender dalam keluarga masyarakat Bugis masih sangat patriarkal. Perempuan memikul tanggung jawab ganda tanpa dukungan yang memadai, sementara suami tetap memegang kendali utama, baik dalam pengambilan keputusan maupun pembagian kerja rumah tangga. Namun demikian, beberapa informan mulai menunjukkan kesadaran akan pentingnya saling berbagi peran sebagai bagian dari dinamika rumah tangga yang lebih setara.

### **C. Norma Kesenjangan Gender dalam Masyarakat Bugis**

Bahwa norma kesetaraan gender dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Tatae masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkal, namun mulai menunjukkan adanya pergeseran menuju hubungan yang lebih setara dalam keluarga. Dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti pengambilan keputusan, pengelolaan ekonomi, dan pendidikan anak, laki-laki masih dianggap sebagai pemimpin utama dan pemegang kontrol akhir. Meskipun demikian, perempuan mulai mendapatkan ruang untuk terlibat aktif, terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga dan pengambilan keputusan yang bersifat harian. Beberapa informan menyatakan bahwa pendapat perempuan mulai dipertimbangkan dan dihargai dalam diskusi keluarga, terutama ketika perempuan turut berkontribusi secara ekonomi. Kesenjangan dalam rumah tangga cenderung dicapai melalui proses kompromi dan diskusi antara pasangan, bukan

melalui pembagian peran yang benar-benar setara. Keputusan-keputusan penting masih kerap bergantung pada persetujuan suami, namun ada indikasi bahwa praktik kolaboratif dalam pengambilan keputusan mulai tumbuh di beberapa keluarga. Perubahan ini terjadi seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan, kesadaran, serta peran ekonomi perempuan dalam keluarga. Kendati belum sepenuhnya setara, norma kesetaraan gender di Kelurahan Tatae mulai terbentuk melalui pengalaman langsung dan adaptasi nilai-nilai tradisional dengan realitas kehidupan modern. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis di wilayah tersebut berada dalam proses transisi menuju pola relasi gender yang lebih adil dan dialogis.

Dalam masyarakat Bugis, pengambilan keputusan dalam keluarga masih sangat dipengaruhi oleh norma adat patriarkal yang memposisikan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama. Hal ini tergambar dalam wawancara dengan Nurmiati yang menyatakan bahwa:

“sering terjadi perdebatan antara dirinya dengan suami terkait siapa yang berhak mengambil keputusan, terutama dalam hal pendidikan anak. Masalah begini kan orang dulu lebih nah utamakan laki-laki lah, jadi biasa saya dan suami sering ribut masalah keputusan”<sup>95</sup>

Rachman juga menegaskan bahwa konflik dalam pengambilan keputusan sering muncul ketika keputusan hanya dibuat oleh satu pihak saja tanpa melibatkan pasangan. Ia mencontohkan,

“Apalagi kalau keputusan dibuat oleh satu pihak saja karna mengikuti adat yang lama begitu”<sup>96</sup>

Ini menandakan bahwa nilai-nilai patriarkal masih mengakar dalam praktik keseharian rumah tangga. Bagi Nadira, suaminya tetap menjadi figur yang dominan

---

<sup>95</sup>Nurmiati, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>96</sup> Rachman, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

dalam mengambil keputusan penting, termasuk urusan pernikahan dan keuangan. Ia menyatakan,

“Kalau masalah yang begitu kalau orang dulu-dulu itu suami memang yang pegang dia yang ambil keputusan”<sup>97</sup>

Pernyataan ini memperkuat gambaran tentang keberlanjutan norma patriarkal di tengah upaya menuju kesetaraan. Hj. Larang mengungkapkan bahwa meskipun peran perempuan mulai meningkat dalam rumah tangga, keputusan akhir tetap berada di tangan suami. Menurutnya,

“Hal kayak begini iya, lebih banyak suamiku tapi sering juga ributka”<sup>98</sup>

Konflik ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai adat dan tuntutan kesetaraan gender. Tasia mengalami situasi serupa ketika ia berbeda pandangan dengan suaminya dalam hal pendidikan anak. Ia mengatakan,

“Itu tentang anak ku yang disuruh puang urus beasiswa nya, tetapi anak ku belum mahu”<sup>99</sup>

Keputusan sepihak dari suami menunjukkan masih kuatnya dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan. Rusdi secara tegas menyatakan bahwa semua keputusan dalam rumah tangga adalah wewenangnya sebagai suami. Ia berkata,

“Dalam keputusan apa pun kalau om itu semua memang suami yang tentukan”<sup>100</sup>

Sikap ini mencerminkan pemahaman konservatif terhadap struktur kekuasaan dalam keluarga. Basri juga mencontohkan bagaimana adat lama masih memengaruhi

<sup>97</sup> Nadira, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>98</sup> Hj. Larang, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>99</sup> Tasia, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>100</sup> Rusdi, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

cara berpikir sebagian keluarga, terutama dalam hal pendidikan perempuan. Ia mengatakan,

“Misalkan seorang anak perempuan mau kuliah tapi orang tua masih berpikir bagus kawin muda saja anak ku dari pada kuliah begitu”<sup>101</sup>

Ahmad menyatakan bahwa meskipun ia bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, keputusan utama tetap berada di tangan suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan belum tentu diikuti oleh kemandirian dalam pengambilan keputusan. Besse mengungkapkan bahwa perbedaan dalam pengambilan keputusan sering kali menimbulkan konflik karena perempuan kurang dilibatkan. Ia menyampaikan,

“Kalau masalah begitu biasanya yang ambil keputusan itu tetap kepala rumah tangga, jadi kita mi ikut saja”<sup>102</sup>

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga masyarakat Bugis masih mencerminkan dominasi nilai-nilai patriarkal. Namun, adanya suara-suara perempuan yang mulai mengutarakan pendapat menunjukkan awal dari pergeseran nilai menuju kesetaraan gender, meskipun proses ini masih menghadapi tantangan dari norma adat yang kuat.

Hasil wawancara mengenai pengambilan keputusan dalam keluarga menunjukkan bahwa dominasi laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih sangat kuat dalam budaya masyarakat Bugis. Pengambilan keputusan penting, seperti dalam hal pendidikan, keuangan, hingga pernikahan anak, umumnya tetap berada di tangan suami tanpa melibatkan istri secara setara. Meskipun beberapa perempuan mulai menyuarakan pendapatnya dan menunjukkan partisipasi dalam proses pengambilan

---

<sup>101</sup> Basri, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>102</sup> Besse, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

keputusan, peran mereka masih terbatas dan sering kali tidak menentukan. Norma adat yang mengutamakan otoritas laki-laki menjadi penghalang utama dalam menciptakan relasi yang setara dalam keluarga. Konflik pun sering terjadi ketika perempuan merasa tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya atau ketika keputusan diambil secara sepihak. Kendati demikian, perubahan mulai terlihat dari adanya resistensi perempuan terhadap dominasi tersebut, yang menjadi indikasi awal adanya pergeseran nilai menuju relasi yang lebih adil dan dialogis dalam rumah tangga. Kesenjangan gender dalam pengambilan keputusan keluarga masih membutuhkan proses panjang yang melibatkan kesadaran bersama, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan domestik dalam rumah tangga masih didominasi oleh laki-laki, namun beberapa informan mengindikasikan adanya keterlibatan perempuan yang semakin aktif. Nurmiati menyatakan bahwa dirinya lebih banyak mengatur urusan rumah tangga dan bekerja di luar rumah, meskipun terkadang suaminya melarang jika ia terlalu sering di luar.

“Kalau saya melihat antara saya dan suami lebih banyak saya karna apa semua urusan rumah tangga saya urus sendiri”<sup>103</sup>

Rachman, sebagai kepala keluarga, juga mengakui bahwa konflik dalam rumah tangga sering kali berkaitan dengan uang jajan anak-anak, namun ia tetap berusaha menuruti keinginan istri demi menghindari konflik yang lebih besar.

“Waktu itu toh mau nya saya kasi sama mi saja uang jajan nya karna lagi kurang, tapi biasalah ibu mau juga kalau beda-beda jadi begitu ribut lagi baru saya ikuti saja maunya”<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Nurmiati, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>104</sup> Rachman, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

Nadira menjelaskan bahwa dalam rumah tangganya, suami hanya berperan memberi nafkah, sedangkan urusan rumah tangga sepenuhnya ia yang tangani.

“Sejauh ini masalah rumah tangga suami hanya tahu memberi nafkah untuk saya dan anak-anak nya”<sup>105</sup>

Meskipun demikian, Nadira juga mengeluhkan kurangnya bantuan dari suami dalam pekerjaan rumah. Larang menggambarkan bahwa sebagai istri ia menangani hampir semua urusan rumah tangga, sementara suaminya enggan melakukan pekerjaan yang dianggap sebagai tanggung jawab perempuan.

“Sejauh yah bu sendiri yang lebih mengurus hal rumah tangga terutama mengurus makanan, pakaian, membersihkan rumah juga”<sup>106</sup>

Tasia menyatakan bahwa seluruh pekerjaan domestik menjadi tanggung jawabnya dan suaminya tidak pernah terlibat. Ia berkata:

“Sejauh ini urusan rumah tangga saya yang penuh tahu tentang urusan kerjaan rumah”<sup>107</sup>

Ini mencerminkan bahwa beban domestik masih belum terbagi secara setara. Rusdi sebagai suami berpendapat bahwa meskipun istrinya memahami segala urusan rumah tangga, tetap dirinya yang memiliki hak mengambil keputusan akhir.

“Segala keputusan masalah rumah tangga itu istriku tahu semuanya tetapi untuk pengambilan keputusan nya harus saya”<sup>108</sup>

Basri menggambarkan dinamika serupa di mana istri memiliki pengetahuan tentang kebutuhan rumah tangga, tetapi tidak selalu dilibatkan dalam pengambilan

<sup>105</sup> Nadira, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>106</sup> Hj. Larang, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>107</sup> Tasia, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>108</sup> Rusdi, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

keputusan, terutama terkait keuangan dan aset. Hal ini menunjukkan ketimpangan dalam wewenang meskipun keterlibatan praktis istri cukup besar. Lanjutan dari wawancara dengan Tasia menunjukkan bahwa urusan belanja dan pembelian besar tetap dipegang oleh suaminya, yang menunjukkan adanya dominasi dalam keputusan finansial.

“Tidak ada, cuman puang memang keputusan lain dia yang atur contoh belanja ke pasar atau ada kah mau nah beli anak-anak”<sup>109</sup>

Nadira mengungkapkan bahwa ia pernah ribut dengan suaminya karena kurangnya dukungan dalam pekerjaan rumah ketika anak masih kecil.

“Pernah, waktu masih awal ketika anak saya masih satu biasa ka ribut sama suami karna tidak nah membantu ka”<sup>110</sup>

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa meskipun perempuan memiliki peran sentral dalam mengatur urusan domestik, dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan masih kuat. Namun, konflik yang muncul dalam proses ini membuka ruang negosiasi yang berpotensi mengarah pada kesetaraan peran gender di ranah domestik, meskipun masih menghadapi kendala budaya dan struktur kekuasaan tradisional.

Hasil wawancara terhadap sepuluh informan mengungkapkan bahwa pendidikan anak, khususnya anak perempuan, dalam masyarakat Bugis masih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat patriarkal yang kuat. Mayoritas informan mengakui bahwa konflik sering terjadi ketika anak perempuan ingin melanjutkan pendidikan tinggi, sementara pihak keluarga, terutama suami atau orang tua, masih memegang

---

<sup>109</sup> Tasia, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>110</sup> Nadira, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

pandangan tradisional bahwa perempuan seharusnya lebih fokus pada peran domestik. Nurmiati menyatakan bahwa meskipun tidak memiliki anak perempuan, ia mengalami konflik ketika anak laki-lakinya ingin mendaftar tentara namun ditolak oleh suami dan orang tua karena pengalaman masa lalu yang gagal.

“Iya betul ji juga toh tapi kembali lagi ke bapaknya bagaimana i”<sup>111</sup>

Ini menunjukkan bahwa keputusan pendidikan tetap didominasi oleh suara laki-laki dalam keluarga. Rachman menyampaikan bahwa dalam kasus pendidikan anak perempuan, ia pernah berselisih paham dengan istrinya ketika keluarga ingin menikahkan anak perempuannya saat masih kuliah. Ia berkata:

“Ibu bersikap keras tapi saya bilang berikan anak-anak kemahuan dulu... bukan lagi jaman Siti Nurbaya lagi begitu”<sup>112</sup>

Hal ini menandakan munculnya kesadaran terhadap hak anak perempuan dalam pendidikan. Nadira menjelaskan bahwa ia kerap mengalami perdebatan dengan suaminya karena suaminya menganggap bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi.

“Sering kali ada perdebatan tentang pendidikan anak yang katanya anak perempuan tidak usah sekolah tinggi”<sup>113</sup>

Hj. Larang juga mengalami konflik dengan suaminya terkait keputusan pendidikan anak perempuan. Ia ingin anaknya kuliah, namun suami lebih memilih anak segera menikah.

<sup>111</sup> Rusdi, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>112</sup> Rachman, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>113</sup> Nadira, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

“Kalau masalah pendidikan anak perempuan sering ma ribut sama suami ku”<sup>114</sup>

Tasia menjelaskan bahwa anak perempuannya mengalami tekanan untuk mengambil jurusan guru sesuai keinginan suami, meskipun anaknya memiliki minat berbeda.

“Puang mau kalau ambil jurusan yang menjadi guru, tetapi anak-anak tidak mahu”<sup>115</sup>

Ini menggambarkan bagaimana pendidikan perempuan masih diarahkan sesuai kehendak laki-laki. Rusdi secara tegas menyatakan bahwa ia tidak mengizinkan anak perempuannya sekolah tinggi karena alasan moral dan pergaulan.

“Kalau masalah itu di era sekarang tidak ku izinkan karna ditahu sekarang bagaimana pergaulan anak-anak cewe sekarang”<sup>116</sup>

Pernyataan ini mencerminkan kontrol penuh laki-laki dalam pengambilan keputusan pendidikan. Basri mencatat bahwa dalam keluarganya, tradisi masih menjadi pertimbangan utama. Ia mencontohkan bahwa keinginan anak perempuan untuk kuliah sering ditentang oleh orang tua yang lebih mendukung pernikahan muda.

“Misalkan seorang anak perempuan mau kuliah tapi orang tua masih berpikir bagus kawin muda saja anak ku”<sup>117</sup>

Sementara itu, Larang menunjukkan bahwa dirinya tetap memperjuangkan pendidikan anak perempuan meskipun awalnya ditentang oleh suaminya. Ia berkata:

---

<sup>114</sup> Hj. Larang, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>115</sup> Tasia, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>116</sup> Rusdi, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>117</sup> Basri, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

“Saya tidak mau kalau kayak saya dulu anak perempuanku yang susah untuk pendidikan”<sup>118</sup>

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa meskipun mulai muncul kesadaran tentang pentingnya pendidikan perempuan, pengambilan keputusan masih sering didominasi oleh laki-laki dalam keluarga. Nilai-nilai patriarkal tetap mengakar kuat, namun konflik yang muncul membuka peluang bagi transformasi nilai menuju kesetaraan gender dalam hal akses pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh informan, konflik dalam ranah ekonomi keluarga memperlihatkan ketegangan antara nilai-nilai adat patriarkal dan tuntutan kesetaraan peran gender dalam rumah tangga masyarakat Bugis. Norma yang mengakar menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan bertugas di ranah domestik, menjadi dasar munculnya ketegangan ketika perempuan mulai turut aktif dalam kegiatan ekonomi. Nurmiati menyampaikan bahwa suaminya bekerja sebagai petani, namun penghasilannya tidak mencukupi, sehingga ia turut mencari penghasilan tambahan dan sering terjadi keributan karena pembagian uang yang tidak merata. Ia mengatakan,:

“Sering ribut masalah uang ji misalkan mau maki ke pasar tapi tidak ada uang nah kasi ki terpaksa uang jualan kueh-kueh ku pake dulu”<sup>119</sup>

Rachman, yang merupakan pensiunan tentara, menilai bahwa meskipun ia satu-satunya pencari nafkah, dominasi dalam keluarga tetap diberikan kepada istri karena seluruh pendapatannya diserahkan kepada istrinya. Ia menyebut,

---

<sup>118</sup> Hj. Larang, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>119</sup> Nurmiati, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

“Kalau mengenai pendapatan itu jelas saya, soalnya kan saya yang bekerja... tapi semua pendapatan saya berikan ke ibu”<sup>120</sup>

Nadira menuturkan bahwa kendati suaminya sebagai pencari nafkah utama, ia tetap berperan penting dalam pengelolaan keuangan keluarga dan pengambilan keputusan ekonomi.

“Memang yang aktif bekerja itu suami ku... walaupun saya tidak bekerja tetap saya yang mengatur masalah uang nya”<sup>121</sup>

Hj. Larang menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam ekonomi rumah tangga cukup signifikan, sebab ia turut berjualan dan mengelola hasil penjualan. Namun tetap terjadi konflik karena suami masih ingin mempertahankan peran dominan sebagai pemberi nafkah.

“Kalau itu tugas memang suami dari dulu lagi mencari nafkah dan memang dalam keluarga saya suami memang pokok”<sup>122</sup>

Tasia, yang juga aktif sebagai wiraswasta, menyebutkan bahwa suaminya tidak sepenuhnya memberikan ruang baginya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ia menyatakan,

“Kalau masalah mengelola ini semua ada di suamiku sehingga apa urusan sedikit dia yang tentukan”<sup>123</sup>

Rusdi secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak memberikan ruang kepada istrinya dalam mencari nafkah karena masih berpegang pada norma tradisional. Ia mengatakan,

“Tidak ada, palingan hanya di dapur saja ji dan memang sudah begitu dari dulu”<sup>124</sup>

<sup>120</sup> Rachman, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>121</sup> Nadira, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>122</sup> Hj. Larang, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>123</sup> Tasia, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>124</sup> Rusdi, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

Basri menjelaskan bahwa konflik sering kali terjadi karena keinginan istri untuk membeli sesuatu tidak sejalan dengan kondisi keuangan, yang menurutnya harus diatur oleh suami.

“Jadi saya sekarang itu yang kelola jadi kalau mau ke pasar baru saya kasi uang sesuai dengan yang dibutuhkan dirumah”<sup>125</sup>

Hj. Larang juga menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam pengelolaan keuangan tidak selalu diterima sepenuhnya oleh suami, terutama ketika ia menggunakan uang hasil usahanya untuk keperluan rumah tangga tanpa izin suami.

“Sebenarnya dari awal nya lagi memang dilarang, tapi saya mau sekali masa harus pada suami terus juga toh”<sup>126</sup>

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun ada perempuan yang aktif secara ekonomi, dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan ekonomi masih kuat. Namun di tengah ketegangan ini, terlihat upaya dari perempuan untuk membangun posisi tawar yang lebih setara dalam pengelolaan keuangan rumah tangga sebagai bagian dari transformasi norma gender dalam masyarakat Bugis.

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai ekonomi keluarga dalam norma kesetaraan gender masyarakat Bugis menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah banyak berperan dalam aktivitas ekonomi, baik melalui usaha sendiri maupun mengelola keuangan rumah tangga, dominasi laki-laki masih sangat kuat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Norma budaya yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama menjadi penghambat bagi perempuan untuk memperoleh peran yang sejajar. Beberapa informan menunjukkan adanya konflik

---

<sup>125</sup> Basri, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>126</sup> Hj. Larang, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

antara suami dan istri terkait pembagian peran ekonomi, terutama ketika perempuan mencoba mengambil inisiatif dalam penggunaan atau pengelolaan uang keluarga. Dalam kasus tertentu, istri harus menggunakan uang hasil kerjanya tanpa sepengetahuan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mendesak, yang kemudian memicu pertengkaran. Namun, ada juga suami yang mempercayakan seluruh pendapatannya kepada istri untuk dikelola, yang menunjukkan bahwa ada variasi dalam praktik relasi ekonomi di dalam rumah tangga Bugis. Perempuan dalam beberapa keluarga justru menjadi tokoh sentral dalam mengatur keuangan, meskipun secara formal tetap mengakui suami sebagai kepala keluarga. Hal ini menunjukkan adanya bentuk negosiasi kultural yang memungkinkan perempuan untuk memperoleh ruang dalam ekonomi keluarga. Namun demikian, masih banyak perempuan yang tidak diberi kesempatan untuk turut menentukan arah keuangan keluarga karena suami merasa lebih berhak berdasarkan norma adat. Kondisi ini mencerminkan bahwa kesetaraan gender dalam ranah ekonomi belum sepenuhnya tercapai, meskipun terdapat tanda-tanda perubahan di beberapa rumah tangga. Peran ekonomi perempuan sering kali tidak diakui secara setara, padahal kontribusi mereka cukup besar bagi kelangsungan ekonomi keluarga. Selain itu, faktor ekonomi juga memengaruhi pembagian kekuasaan dalam rumah tangga, di mana perempuan yang berpenghasilan dianggap memiliki lebih banyak ruang untuk bersuara.

Kesetaraan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga masih memerlukan proses dialog yang panjang antara pasangan, serta dukungan nilai-nilai baru yang lebih adil. Perubahan sosial yang terjadi juga turut mendorong pergeseran nilai dalam masyarakat Bugis, meski masih menghadapi resistensi dari budaya patriarkal yang mengakar kuat. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan gender dan pembiasaan nilai-

nilai demokratis dalam keluarga sangat penting untuk menciptakan hubungan ekonomi yang adil dan saling menghargai antar anggota keluarga. Kesimpulannya, ekonomi keluarga menjadi medan penting dalam mengukur sejauh mana kesetaraan gender diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis.

Hasil penelitian terhadap sepuluh informan menunjukkan bahwa konflik terkait pengelolaan pendapatan dan aset keluarga menjadi salah satu pemicu munculnya norma baru yang lebih setara secara gender dalam keluarga masyarakat Bugis. Hal ini terlihat dari perubahan struktur pengelolaan keuangan rumah tangga, yang mulai memberikan ruang lebih besar bagi perempuan untuk mengambil peran sebagai pengelola utama. Nurmiati mengungkapkan bahwa saat panen tiba, seluruh pendapatan dikelolanya sendiri untuk kebutuhan rumah tangga, meskipun sebelumnya semua keputusan keuangan dipegang oleh suaminya. Ia mengatakan:

“Kalau dulu suamiku semua mengatur baru saya ikut ji, tetapi berjalan waktu karna saya juga sudah punya penghasilan dan saya kelola semua keuangan”<sup>127</sup>

Abd. Rachman menjelaskan bahwa dalam keluarganya, meskipun ia yang bekerja, seluruh pendapatan diberikan kepada istrinya untuk dikelola. Namun demikian, setiap keputusan penting tetap didiskusikan bersama agar tidak menimbulkan konflik. Ia menyatakan:

“Jadi saat itu saya pikir-pikir lagi cocok juga apa nah bilang jadi saya tidak jadi renovasi rumah ku”<sup>128</sup>

Nadira mencatat bahwa meskipun dirinya tidak bekerja, ia diberikan tanggung jawab penuh dalam mengatur keuangan rumah tangga. Konflik muncul ketika

---

<sup>127</sup> Nurmiati, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>128</sup> Rachman, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

suaminya tidak menyeter uang secara penuh, dan hal ini sering menimbulkan perdebatan.

“Kalau sekarang tidak mi. Tapi masih biasa ji memicu perdebatan kalau kadang tidak ma stor uang full i”<sup>129</sup>

Hj. Larang mengungkapkan bahwa meskipun ia memiliki penghasilan dari hasil jualan, tetap meminta uang dari suami karena menurutnya memberi nafkah adalah kewajiban laki-laki. Ia mengatakan,

“Harus minta, kita istri itu biar pintar cari uang suami juga tetap memberi apa kewajiban nya”<sup>130</sup>

Tasia menegaskan bahwa meskipun ia yang mengelola keuangan rumah tangga, setiap pengeluaran besar tetap harus sepengetahuan suami. Konflik muncul ketika ia membeli sesuatu tanpa memberitahu terlebih dahulu.

“Pernah waktu beli ka emas tidak kutanyakan marah I padahal uangku ji sendiri itu”<sup>131</sup>

Rusdi sebagai kepala keluarga menekankan bahwa semua pendapatan dan aset tetap di bawah kendalinya, meskipun istrinya mengetahui kebutuhan keluarga. Ia berkata,

“Kalau bicara pendapatan iya saya dan saya juga mengatur”<sup>132</sup>

Basri mengalami konflik dengan istrinya terkait pengelolaan pendapatan setelah panen. Ia merasa perlu mengatur keuangan karena dirinya yang mencari nafkah, meskipun istri ingin berperan lebih dalam pengelolaan.

---

<sup>129</sup> Nadira, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>130</sup> Hj. Larang, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>131</sup> Tasia, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>132</sup> Rusdi, *wawancara*, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

“Jadi saya sekarang itu yang kelola jadi kalau mau kepasar baru saya kasi uang sesuai dengan yang dibutuhkan dirumah”<sup>133</sup>

Hj. Larang mengungkapkan bahwa dalam keluarganya, hampir semua pengelolaan rumah tangga diserahkan kepada dirinya. Ia menyatakan bahwa hal ini bukan lagi menjadi konflik karena sudah dianggap biasa.

“Semua urusan rumah tangga atau urusan yang lain saya yang atur suami cuman kerja saja”<sup>134</sup>

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa norma tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pengelola utama ekonomi keluarga mulai bergeser. Perempuan kini memainkan peran lebih besar dalam pengelolaan pendapatan dan aset keluarga. Meskipun masih terjadi konflik, hal ini menjadi indikasi awal adanya perubahan ke arah kesetaraan gender dalam ranah ekonomi rumah tangga masyarakat Bugis.

#### **D. Pembahasan Penelitian**

##### **1. Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Bugis Di Kelurahan Tatae**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Tatae menunjukkan dinamika yang kompleks antara nilai-nilai budaya lokal dan perubahan sosial yang berlangsung secara perlahan. Masyarakat Bugis secara historis memiliki sistem sosial yang patriarkal, di mana laki-laki diposisikan sebagai pemimpin rumah tangga dan pemegang otoritas utama dalam pengambilan keputusan. Namun, hasil observasi dan wawancara di Kelurahan Tatae mengungkap bahwa struktur ini mulai mengalami

---

<sup>133</sup> Basri, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

<sup>134</sup> Hj. Larang, wawancara, Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2024.

pergeseran, terutama dalam konteks ekonomi keluarga, pendidikan, dan keterlibatan perempuan dalam ruang publik. Banyak perempuan di wilayah ini yang tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga berperan aktif sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan bersama suami.<sup>135</sup> Nilai budaya seperti *siri* (harga diri) dan *pessae* (rasa malu atau segan) masih menjadi penentu perilaku gender, namun dalam beberapa kasus, nilai tersebut justru dimaknai ulang untuk mendukung partisipasi perempuan secara lebih aktif. Dalam keluarga yang lebih terbuka, perempuan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, mengelola keuangan, bahkan membuat keputusan strategis yang berdampak pada keberlangsungan rumah tangga. Meski demikian, tidak dapat diabaikan bahwa sebagian besar relasi gender masih memperlihatkan ketimpangan, terutama dalam beban kerja domestik yang sepenuhnya dibebankan kepada perempuan, serta adanya pembatasan terhadap peran perempuan di luar rumah.

#### 1) Pemahaman Dasar tentang Gender

Sebagian besar informan menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang konsep gender sebagai konstruksi sosial. Gender masih dipahami sebagai kodrat atau takdir biologis, sehingga peran laki-laki dan perempuan dianggap sudah seharusnya berbeda. Meski demikian, ada informan yang mulai memahami bahwa peran gender dapat dinegosiasikan dan berubah sesuai kondisi. Teori Konflik melihat keterbatasan pemahaman ini sebagai hasil dari dominasi ideologi patriarkal yang direproduksi secara sosial melalui keluarga dan lembaga budaya. Teori Feminisme menilai bahwa pemahaman yang tidak

---

<sup>135</sup> Risal, Andi Agustang Andi Agustang, and Muhammad Syukur, 'Peranan Perempuan Tani dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng', *Phinisi Integration Review*, 4.2 (2021), pp. 282–91.

kritis terhadap gender berkontribusi terhadap pelanggaran subordinasi perempuan dalam masyarakat.<sup>136</sup>

## 2) Persepsi terhadap Peran Laki-Laki dan Perempuan

Persepsi umum masyarakat masih menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan utama, dan pencari nafkah. Perempuan cenderung ditempatkan pada ranah domestik, sebagai pengurus rumah tangga dan pendukung keputusan suami. Namun, sebagian informan mulai menunjukkan perubahan persepsi dan mengakui pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dan urusan ekonomi. Teori Konflik mengidentifikasi ketimpangan ini sebagai bentuk dominasi kelompok laki-laki terhadap perempuan dalam struktur sosial rumah tangga. Teori Feminisme menyoroti pentingnya menantang konstruksi peran gender tradisional untuk menciptakan relasi yang setara, serta mendorong redistribusi kuasa dalam keluarga.

## 3) Pengaruh Budaya Bugis terhadap Pemahaman Gender

Budaya Bugis yang kuat dengan nilai *siri'*, *pessae*, dan struktur adat turut memperkuat konstruksi gender tradisional. Perempuan dituntut untuk taat, sabar, dan mengutamakan keharmonisan rumah tangga, sementara laki-laki diharapkan tegas, berani, dan menjadi pemimpin. Namun, nilai musyawarah (*bicara bersama*) juga memberi ruang untuk negosiasi peran, terutama dalam keluarga-keluarga yang mulai terbuka terhadap kesetaraan. Teori Konflik memandang bahwa nilai-nilai budaya ini seringkali digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan patriarkal. Teori Feminisme memandang

---

<sup>136</sup> Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Garudhawaca, 2016).

budaya sebagai arena pertarungan ideologi, sehingga memungkinkan resistensi, reinterpretasi, dan pembentukan norma baru yang lebih egaliter di tengah tradisi yang maskulin.<sup>137</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Bugis terhadap konsep gender masih didominasi oleh pandangan tradisional yang menganggap peran laki-laki dan perempuan sebagai kodrat alamiah, bukan hasil konstruksi sosial. Hal ini berdampak pada persepsi yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan utama, serta pencari nafkah, sementara perempuan lebih diarahkan pada peran domestik dan pendukung keputusan suami. Namun, muncul pula dinamika baru di mana sebagian informan mulai menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya kesetaraan dalam pengambilan keputusan serta keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan ekonomi. Budaya Bugis yang sarat dengan nilai *siri'*, *peppae*, serta sistem patriarkal adat turut memperkuat posisi dominan laki-laki, tetapi nilai musyawarah yang melekat dalam budaya lokal juga membuka ruang bagi terjadinya negosiasi dan kompromi dalam rumah tangga. Dalam kerangka teori konflik, kondisi ini menunjukkan adanya pertentangan antara struktur kekuasaan patriarkal dengan dorongan perubahan menuju relasi yang lebih setara, terutama ketika perempuan mulai menuntut ruang partisipasi yang lebih besar. Sementara itu, menurut teori feminisme, struktur peran gender yang timpang dalam masyarakat Bugis merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang harus dikritisi dan dilawan melalui kesadaran kolektif serta perjuangan perempuan dalam membentuk relasi yang adil dan setara, baik dalam rumah tangga maupun di ruang publik.

---

<sup>137</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Kajian Gender: Berperspektif Budaya Patriarki* (Universitas Brawijaya Press, 2024).

### **E. Norma Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Bugis**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma kesetaraan gender dalam masyarakat Bugis mulai mengalami perubahan, terutama dalam ranah domestik dan ekonomi keluarga. Perempuan tidak lagi hanya menjalankan peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga aktif dalam pengambilan keputusan, pencari nafkah, serta pengelola keuangan. Perubahan ini dipicu oleh kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan kesadaran akan peran yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan.<sup>138</sup>

#### **1. Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam rumah tangga masih cenderung didominasi oleh laki-laki, terutama dalam hal strategis seperti pendidikan anak dan pengelolaan aset. Namun, sebagian perempuan kini mulai dilibatkan, terutama dalam keputusan sehari-hari dan keuangan rumah tangga. Teori Konflik menjelaskan hal ini sebagai bentuk ketegangan antara dominasi patriarkal dan tuntutan akan peran yang lebih setara. Teori Feminisme melihat keterlibatan perempuan sebagai langkah awal menuju redistribusi kuasa dalam ranah domestik.

### **F. Pembagian Peran Domestik dan Publik**

Masih terdapat pembagian peran tradisional di mana perempuan lebih dominan dalam urusan domestik dan laki-laki di ranah publik. Namun, ditemukan adanya pergeseran, di mana perempuan mulai aktif di sektor publik seperti bekerja, berdagang, atau terlibat dalam organisasi sosial. Teori Konflik memandang ini sebagai gesekan

---

<sup>138</sup> Diva Ananda, Elminda Aprillianda, and Cut Kumala Sari, 'Pendidikan Perempuan Sebagai Katalisator Perubahan Sosial Dan Kesetaraan Gender', *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 3.1 (2025), pp. 39–54.

antara nilai-nilai tradisional dan perubahan sosial akibat kebutuhan ekonomi dan pendidikan. Teori Feminisme memaknai keterlibatan perempuan di ruang publik sebagai upaya merebut ruang yang selama ini dimonopoli laki-laki.<sup>139</sup>

### **G. Pengaruh Lembaga Adat dan Agama**

Lembaga adat dan agama masih memegang pengaruh kuat dalam membentuk norma gender. Banyak aturan adat dan tafsir agama yang menguatkan posisi laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pengikut. Namun, sebagian masyarakat mulai melakukan interpretasi ulang terhadap nilai-nilai tersebut secara lebih inklusif dan setara. Teori Konflik melihat lembaga adat dan agama sebagai alat reproduksi kekuasaan yang mempertahankan status quo. Teori Feminisme mengkritik peran lembaga tersebut yang sering menempatkan perempuan pada posisi subordinat, namun juga mendukung reinterpretasi ajaran sebagai ruang perjuangan kesetaraan.

### **H. Konflik dan Ketimpangan dalam Relasi Gender**

Terdapat berbagai bentuk konflik akibat ketimpangan gender, seperti kurangnya pengakuan terhadap kontribusi perempuan, beban ganda, serta ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan warisan. Konflik ini tidak hanya terjadi antar individu, tapi juga secara struktural dalam institusi sosial. Teori Konflik menyatakan bahwa ketimpangan ini adalah akibat dari distribusi kekuasaan yang timpang dan harus diubah melalui perjuangan sosial. Teori Feminisme menekankan pentingnya kesadaran kritis dan aksi kolektif perempuan untuk melawan struktur yang mendiskriminasi dan menciptakan ketimpangan.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Ahmad Maulidizen, 'KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM', *BUKU AJAR Pengantar Ekonomi Islam*, 1 (2024).

<sup>140</sup> Riadhil Jannah and Alvina Mauliya, 'Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perspektif Feminisme Kontemporer', *Sagoe Cendikia*, 2.1 (2025), pp. 16–37.

Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks teori konflik, perubahan ini mencerminkan adanya ketegangan sosial antara struktur kekuasaan patriarkal yang sudah mapan dan tuntutan peran gender yang lebih egaliter. Konflik peran ini mendorong lahirnya norma-norma baru sebagai hasil dari negosiasi dan perjuangan sosial dalam keluarga dan komunitas. Sementara itu, dari perspektif teori feminisme, pergeseran ini memperlihatkan proses pembebasan perempuan dari dominasi laki-laki, di mana perempuan mulai memiliki ruang untuk menentukan nasibnya sendiri, menyuarakan pendapat, dan memperoleh akses yang lebih adil terhadap sumber daya serta hak sosial. Ini menjadi langkah awal menuju kesetaraan gender yang lebih substansial di masyarakat Bugis.

Dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Bugis tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sistem nilai tradisional yang terus berinteraksi dengan perubahan sosial modern. Dalam konteks Kelurahan Tatae, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun perempuan mulai mendapatkan ruang dalam pengambilan keputusan dan ekonomi keluarga, persepsi umum masyarakat masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dalam kacamata *hegemonic masculinity* sebagaimana diutarakan oleh R. W. Connell, kondisi ini merupakan bentuk dominasi nilai maskulinitas ideal yang direproduksi oleh masyarakat sebagai standar utama kepemimpinan, keberanian, dan otoritas, sehingga laki-laki tetap dijadikan figur utama dalam rumah tangga dan masyarakat. Perempuan yang melampaui peran domestik terkadang masih mendapatkan resistensi sosial atau dipandang “tidak sesuai kodrat”.

Struktur gender yang timpang di masyarakat Bugis juga dapat dibaca melalui teori *kekerasan simbolik* dari Pierre Bourdieu. Dalam kerangka ini, dominasi laki-laki dilegitimasi secara halus melalui adat, agama, dan praktik sosial yang diterima tanpa

pertanyaan oleh perempuan itu sendiri. Ketika perempuan menerima pembagian peran tanpa resistensi dan melihatnya sebagai kewajaran, maka yang terjadi bukan hanya ketimpangan struktural, melainkan juga ketundukan simbolik yang membungkam potensi kritis. Konsep *habitus* yang diwariskan dari generasi ke generasi juga turut mengatur ekspektasi sosial terhadap bagaimana perempuan Bugis “seharusnya” bersikap, baik sebagai istri, ibu, maupun anggota komunitas.

Penelitian yang dilakukan Hasmawati dkk.<sup>141</sup> dalam kajian *La Galigo* menunjukkan bahwa perempuan dalam tradisi sastra Bugis memiliki peran penting, seperti tokoh We Tenriabeng yang menjadi penentu keputusan strategis. Ini menunjukkan bahwa dalam akar budaya Bugis terdapat jejak kesetaraan yang dapat dijadikan rujukan reinterpretasi peran perempuan hari ini. Artinya, budaya Bugis bukan semata bersifat patriarkal, melainkan mengandung ambiguitas yang dapat dibaca secara progresif. Selain itu, penelitian Kathryn Robinson (1998) dalam bukunya *Stepchildren of Progress* menyatakan bahwa dalam konteks Bugis, kesetaraan gender tidak bisa dilepaskan dari kerangka adat, ekonomi, dan politik lokal. Robinson menyoroti bahwa perempuan di Sulawesi Selatan memiliki ruang strategis dalam jaringan ekonomi, namun sering tidak diakui dalam struktur formal kepemimpinan.

Sementara itu, pendekatan *feminisme interseksional* yang dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw menyoroti pentingnya memperhatikan irisan antara gender, kelas, usia, dan pendidikan dalam memahami ketidaksetaraan. Dalam konteks Tatae, perempuan dari kalangan terdidik cenderung lebih kritis terhadap ketimpangan gender, sementara perempuan yang kurang berpendidikan atau berasal dari keluarga adat konservatif cenderung menerima struktur patriarkal sebagai sesuatu yang sakral. Hal

---

<sup>141</sup> Hasmawati SU, Ery Iswary, and Prasuri Kuswarini, ‘Relasi Gender Perempuan Dalam Teks *La Galigo*’, *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4.3 (2023), pp. 1914–25, doi:10.55681/jige.v4i3.1251.

ini memperkuat pentingnya pendidikan gender yang kritis dan berbasis konteks lokal dalam membentuk kesadaran kolektif.

Nilai-nilai budaya lokal seperti *sipakatau* (saling memanusiakan), *sipakalebbi* (saling menghargai), dan *sipakainge* (saling mengingatkan) yang menjadi fondasi budaya Bugis sesungguhnya mengandung potensi besar untuk dijadikan landasan nilai-nilai kesetaraan gender.<sup>142</sup> Dalam praktik masyarakat yang lebih terbuka, prinsip musyawarah dan pengakuan terhadap kontribusi perempuan mulai menjadi bagian dari narasi baru yang mendukung keadilan relasi gender. Hal ini menegaskan bahwa transformasi nilai tidak harus menanggalkan adat, tetapi justru melalui reinterpretasi nilai-nilai adat yang mengarah pada keadilan dan kesetaraan.

Sebagai penutup analisis, dapat dikatakan bahwa perubahan kesadaran gender dalam masyarakat Bugis tidak akan efektif hanya melalui intervensi regulasi atau program pemerintah. Diperlukan proses dialog budaya yang melibatkan tokoh adat, agama, dan masyarakat secara luas agar nilai-nilai kesetaraan tidak sekadar dipahami sebagai produk modernisasi, melainkan sebagai bagian dari *restorasi nilai luhur lokal* yang berpihak pada keadilan.

Pendekatan *capabilities approach* dari Amartya Sen dan Martha Nussbaum dapat digunakan untuk memperluas pemahaman mengenai norma kesetaraan gender di masyarakat Bugis.<sup>143</sup> Pendekatan ini tidak hanya melihat apakah perempuan sudah bekerja atau terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi menanyakan apakah mereka benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih, mengambil keputusan, dan

---

<sup>142</sup> Amalia Amalia, Zulfah Zulfah, and Mumtahanah Mumtahanah, 'NILAI-NILAI PENDIDIKAN PADA BUDAYA LOKAL SIPAKATAU SIPAKALEBBI SIAPAKINGE DI MASYARAKAT RI BALLA LOMPOA KELURAHAN BAJU BODOA KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS', *JURNAL ALMANAR*, 1.1 (2024).

<sup>143</sup> Iswahyudi Iswahyudi and Naupal Asnawi, 'Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen Dan Martha Nussbaum', *Multikultura*, 3.4 (2024), p. 4.

mengembangkan potensinya. Dengan kata lain, akses saja belum cukup jika tidak dibarengi dengan kemampuan substantif untuk memanfaatkan akses tersebut secara penuh. Dalam konteks Kelurahan Tatae, beberapa perempuan sudah aktif secara ekonomi, tetapi tetap tidak memiliki kontrol atas pengambilan keputusan dalam rumah tangga atau komunitas. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan belum sepenuhnya terwujud karena belum terjadi redistribusi kuasa secara menyeluruh.

Konsep *4R + 1C* menjawab ketimpangan dapat dijadikan sebagai kerangka intervensi lokal. Pertama, *recognition* (pengakuan) atas kontribusi perempuan di ranah domestik dan publik. Kedua, *redistribution* (redistribusi) peran, akses sumber daya, dan kuasa antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, *representation* (representasi) yang bermakna dalam lembaga formal seperti RT/RW, LPM, dan forum musyawarah desa. Keempat, *reconciliation* atau reinterpretasi budaya, yaitu membaca ulang nilai *siri'*, *sipakatau*, dan *sipakainge* dalam kerangka kesetaraan. Kelima, *capacity building*—penguatan kapasitas perempuan dalam bentuk pelatihan, pendidikan hukum, dan advokasi berbasis komunitas. Pendekatan ini penting untuk menjamin bahwa perubahan sosial tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi menyentuh struktur dan nilai yang selama ini menopang ketimpangan gender.

Perbandingan dengan riset Sharyn Graham Davies yang meneliti lima gender dalam masyarakat Bugis juga dapat menambah kedalaman analisis.<sup>144</sup> Kehadiran gender *calabai*, *calalai*, dan *bissu* membuktikan bahwa secara historis, masyarakat Bugis telah memiliki spektrum gender yang lebih inklusif dibanding dikotomi laki-laki–perempuan. Namun, tekanan dari institusi agama dan negara menyebabkan keragaman ini terpinggirkan. Jika keragaman gender saja bisa diakui secara budaya,

---

<sup>144</sup> Sharyn Graham Davies, *Keberagaman Gender Di Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

maka seharusnya ruang kesetaraan bagi perempuan juga dapat dikembangkan melalui pendekatan yang berbasis nilai lokal. Hal ini memperkuat argumen bahwa budaya bukan penghalang, tetapi bisa menjadi jembatan dalam mendorong kesetaraan asalkan dilakukan melalui proses reartikulasi nilai.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesetaraan gender dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Tatae menunjukkan dinamika yang kompleks. Meskipun masyarakat masih memegang kuat nilai-nilai patriarkal dan budaya lokal seperti siri' dan pessae, mulai terlihat adanya perubahan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan tidak lagi hanya terbatas pada peran domestik, tetapi juga mulai aktif sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan bersama suami. Sebagian masyarakat bahkan mulai membuka ruang bagi perempuan untuk lebih berperan di sektor ekonomi dan publik. Namun, pemahaman tentang konsep gender masih terbatas dan cenderung dipahami sebagai kodrat biologis, bukan konstruksi sosial. Persepsi tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin tetap mendominasi, meskipun perlahan mulai digeser oleh kesadaran akan pentingnya kesetaraan dalam rumah tangga. Dalam pandangan teori konflik, kondisi ini mencerminkan adanya pertentangan antara nilai-nilai lama yang mempertahankan dominasi laki-laki dan tuntutan perubahan menuju keadilan gender. Sementara menurut teori feminisme, perubahan ini menjadi bagian dari perjuangan perempuan untuk memperoleh hak dan ruang yang setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga.

Norma kesetaraan gender dalam masyarakat Bugis mulai mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam ranah domestik dan ekonomi. Perempuan kini tidak lagi hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga aktif dalam pengambilan keputusan, pencari nafkah, dan pengelola keuangan. Meskipun pengambilan keputusan strategis masih didominasi laki-laki, perempuan mulai

dilibatkan dalam keputusan sehari-hari. Pembagian peran tradisional antara domestik dan publik juga mulai bergeser, seiring meningkatnya keterlibatan perempuan di ruang publik.

Pengaruh lembaga adat dan agama masih kuat dalam membentuk peran gender, namun mulai muncul tafsir yang lebih inklusif. Ketimpangan gender juga masih terjadi, terutama dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hak waris. Dalam perspektif teori konflik, perubahan ini mencerminkan adanya ketegangan antara struktur patriarkal dan tuntutan kesetaraan, yang mendorong munculnya norma-norma baru. Sedangkan menurut teori feminisme, perubahan ini merupakan bagian dari proses pembebasan perempuan dan perjuangan untuk memperoleh keadilan serta kesetaraan dalam kehidupan sosial dan keluarga..

## **B. Saran**

### **1. Peningkatan Literasi Gender di Masyarakat**

Disarankan agar lembaga pendidikan, tokoh adat, dan pemerintah setempat lebih aktif mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang kesetaraan gender yang sejalan dengan nilai budaya lokal seperti sipakatau, sipakaraja, dan sipakainge. Hal ini penting agar kesadaran gender tidak hanya berkembang di tingkat individu, tetapi juga melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat.

### **2. Pelibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan**

Perlu ada dorongan kebijakan maupun pendekatan berbasis budaya agar perempuan semakin dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan penting, baik di dalam rumah tangga maupun ruang publik. Hal ini dapat memperkuat harmoni keluarga dan menciptakan relasi yang lebih adil.

### 3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Diperlukan program pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan dukungan terhadap usaha kecil berbasis rumah tangga. Dengan demikian, perempuan dapat berperan lebih mandiri secara ekonomi tanpa menggeser peran laki-laki, melainkan saling melengkapi.

### 4. Pendekatan Pendidikan Inklusif

Institusi pendidikan diharapkan memberikan ruang yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan dalam mengejar pendidikan tinggi. Diperlukan juga kurikulum yang menyisipkan nilai-nilai kesetaraan gender agar generasi muda memiliki pandangan yang lebih terbuka dan progresif.

### 5. Penelitian Lanjutan

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menelusuri lebih dalam peran tokoh adat dan agama dalam membentuk perspektif gender di masyarakat Bugis, serta mengkaji kesetaraan gender dari aspek hukum adat dan tafsir keagamaan. Penelitian kualitatif etnografi atau partisipatif juga dapat memperkaya pemahaman tentang praktik relasi gender di berbagai lapisan masyarakat Bugis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. (2019). *Pengaruh motivasi dan beban kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Sumber Tirta Anugrah Rezeki Pekanbaru* (Skripsi). UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Audina, D. J. (2021). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(6), 226–232.
- Abdullah, M. Q. (2020). *Riset budaya: Mempertahankan tradisi di tengah krisis moralitas*.
- Amalia, Yusrotul. (2024). *Representasi Feminim Dan Maskulin Pada Karakter Tokoh Iteung Dalam Film “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas” Menurut Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure*. Diss. IAIN Kediri.
- Aizid, Rizem. (2024). *Pengantar Feminisme*. Anak Hebat Indonesia.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi penelitian kuantitatif, komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin, Syamsiah, Et Al. *Pengantar Sosiologi*. Zahir Publishing, 2024.
- Demartoto, A. (2007). *Menyibak sensitivitas gender dalam keluarga difabel*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Dalimoenthe, Ikhlasih. *Sosiologi Gender*. Bumi Aksara, 2021.
- Émile Durkheim, *The Division Of Labour In Society*, Trans. W.D. Halls (New York: Free Press, 1997).
- Faqih, M. (2007). *Analisis gender & transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feminisme, Gender. (2019). "Gender Dan Feminisme: Sebuah Kajian Dari Perspektif Ajaran Islam Gender And Feminism: A Research From The Perspective Of Islamic Studies Dadang Jaya."

- Gea, A. A., dkk. (2002). *Relasi dengan sesama*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- George Ritzer. (2014). *Sociological Theory*, 9th Ed. (New York: Mcgraw-Hill).
- Hamka, I. H. (2015). *Nilai-nilai kesetaraan gender dalam naskah Lagaligo* (Skripsi Sarjana). Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Herlina, A. (2020). *Respon masyarakat terhadap program peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kelurahan Gilireng* (Disertasi). IAIN Parepare.
- Hartanti, S. (2020). *Gender dalam birokrasi pemerintahan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hidir, Achmad, And Rahman Malik. *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Jonathan H. Turner. (2003). *The Structure Of Sociological Theory*, 7th Ed. (Belmont, Ca: Wadsworth).
- Jones, Pip. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2003). *Keputusan Menteri Dalam Negeri No.132 Tahun 2003 tentang Ketentuan Umum, Pasal I*.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kodir, F. A. (2019). *Qiraah Mubadalah: Tafsir progresif untuk gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Lawang, R. (1994). *Pengantar sosiologi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Liata, N., & Fazal, K. (2021). Multikultural dalam perspektif sosiologis. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2), 188–201.
- Latief, M. C. (2016). *Komunikasi beda gender dalam masyarakat Bugis di Desa Kemujan Kepulauan Karimunjawa* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya), 61.
- Liata, Nofal, And Khairil Fazal. (2021). "Multikultural Dalam Perspektif Sosiologis." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*.
- Mulia, S. M., dkk. (2001). *Keadilan kesetaraan gender: Perspektif Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Mahyuddin. (2022). *Sosiologi gender: Diskursus gender dalam dinamika perubahan sosial*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Nurhasana. (2020). Pemikiran Hamka dan Nasaruddin Umar tentang peran perempuan dalam kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 5(2), 291.
- Pickering, M. (1999). Angels and demons in the moral vision of Auguste Comte. *Journal of the History of Ideas*, 60(3), 465–488.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar.
- Rahma, A. (2015). Harmoni dalam keluarga perempuan karir: Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. *Jurnal Palastren*, 8(1), 13–14.
- Raho, B. (2007). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Robert K. Merton, *Social Theory And Social Structure* (New York: Free Press, 1968).
- Rofiah, K. (2021). *Produktivitas ekonomi perempuan dalam kajian Islam dan gender*. Q Media.
- Rilla Sovitriana, Psikolog. *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rauf, Abdur, Amalia Desy Wahyuni, And Zafilul Umam. *Refleksi Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam (Masa Klasik Dan Khulafaur Rasyidin)*, (2025). Penerbit Kbm Indonesia.
- Rokhmansyah, Alfian. (2016). *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Garudhawaca.

- Raho, Bernard. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Swara Pendidikan, "Guru dan Staf Kesehatan di Pinrang Ikuti Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak," *swarapendidikan.co.id*, 18 Oktober 2024, diakses 21 Mei 2025, <https://swarapendidikan.co.id/guru-dan-staf-kesehatan-di-pinrang-ikuti-pelatihan-penanganan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/>.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers).
- Saifuddin, A. F. (2005). *Antropologi kontemporer: Suatu pengantar kritis mengenai paradigma*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951).
- Umar, N. (2001). *Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (1996). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2008). *Metodologi penelitian sosial* (Cet. II). Jakarta: Bumi Aksara.
- Wati, N. L. P. M. (2023). *Pengaruh stres kerja, konflik interpersonal dan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada Hotel Como Shambhala Estate Gianyar* (Disertasi). Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi agama*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Wiranata, Anom, And S. Ma. (2020). "Perubahan Sosial Dalam Perspektif Pierre Bourdieu." *Universitas Udayana, Kuta*.
- Yunus, R. (2022). *Analisis gender terhadap fenomena sosial*. Humanities Genius.

- You, Y. (2021). *Gender, feminisme dan fungsionalisme struktural*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Yusuf, M. (2020). *Relasi teks dan konteks*. Yogyakarta: Indie Book Corner.
- Yusuf, M. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zubair, M. K., dkk. (2020). *Pedoman penulisan karya ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.



# LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE<br/>FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH<br/>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307</b> |
|                                                                                   | <b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN<br/>PENULISAN SKRIPSI</b>                                                                                                                            |

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD RUSDI BIN MOHD TALIB  
NIM : 18.3500.022  
FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
PRODI : SOSIOLOGI AGAMA  
JUDUL : DINAMIKA KESETARAAN GENDER DALAM  
MASYARAKAT BUGIS (STUDI KASUS KELURAHAN TATAE KECAMATAN  
DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG)

**I. Identitas Responden**

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

**II. Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Bugis Di Kelurahan Tatae**

**a. Pengambilan Keputusan**

- 1) Bagaimana pemahaman Anda tentang bentuk konflik yang muncul antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan rumah tangga (misalnya dalam kasus pernikahan atau kasus lain), dan bagaimana konflik tersebut memperkuat atau melemahkan relasi gender?

- *Pernahkah mengalami perbedaan pendapat antara kita dan istri pada saat anak anda mau menikah dilamar oleh seseorang (kita setuju istri tidak setuju).*
  - *Apakah setelah terjadi perbedaan pendapat bapak diskus dengan dan menemukan Solusi, atau bapak mengabaikan kemuan istr?.*
- 2) Menurut Anda, Apakah konflik dalam pengambilan keputusan keluarga menciptakan redistribusi peran gender atau memperkuat dominasi salah satu pihak?
  - 3) Bagaimana pemhaman Anda mengenai respon anggota keluarga terhadap perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, dan sejauh mana konflik tersebut menghasilkan negosiasi yang setara secara gender?
- b. Pendidikan Keluarga**
- 4) Bagaimana konflik antara orang tua terkait pendidikan anak perempuan dan laki-laki mencerminkan ketimpangan atau kemajuan kesetaraan gender?
  - 5) Sejauh mana konflik dalam alokasi sumber daya pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan memicu perubahan nilai-nilai gender dalam keluarga?
  - 6) Bagaimana konflik pandangan antar generasi dalam keluarga mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan berkontribusi terhadap transformasi peran gender?
- c. Ekonomi Keluarga**
- 7) Bagaimana konflik peran pencari nafkah antara suami dan istri mempengaruhi pola relasi kekuasaan dalam rumah tangga?
  - 8) Apakah konflik mengenai pengelolaan keuangan keluarga menciptakan peluang bagi redistribusi peran ekonomi berbasis kesetaraan gender?
  - 9) Bagaimana konflik akibat perbedaan pendapatan antara suami dan istri mempengaruhi struktur otoritas dalam keluarga?

- 10) Dalam konteks ekonomi keluarga, bagaimana konflik terkait pembagian kerja domestik dan produktif digunakan sebagai mekanisme penyesuaian peran gender?

### **III. Norma Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Bugis**

#### **a. Pengambilan Keputusan**

- 1) Bagaimana konflik antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga Bugis mencerminkan pertentangan antara norma adat patriarkal dan nilai-nilai kesetaraan gender modern?
- 2) Sejauh mana konflik dalam pengambilan keputusan domestik menjadi sarana negosiasi norma gender yang lebih setara antara pasangan?

#### **b. Pendidikan Keluarga**

- 3) Bagaimana konflik dalam menentukan akses pendidikan bagi anak perempuan menunjukkan pergeseran norma tradisional menuju kesetaraan gender?

#### **c. Ekonomi Keluarga**

- 4) Bagaimana konflik peran ekonomi antara suami dan istri mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai adat dan tuntutan kesetaraan peran gender dalam ranah ekonomi?
- 5) Apakah konflik terkait pengelolaan pendapatan dan aset keluarga menjadi pemicu munculnya norma baru yang lebih setara secara gender?

Parepare, 09 Mei 2025

Mengetahui,

Pembimbing



**Abd. Wahidin, M.Si.**  
**NIP. 197801282023211005**

## Lampiran 2 Biodata Narasumber

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Tasin

Alamat : Tatae

Usia : 51

Menerangkan Bahwa

Nama : Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib

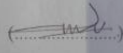
Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : FUAD

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul  
**"DINAMIKA KESETRAAN GENDER DALAM MASYARAKAT BUGIS (STUDI KASUS MASYARAKAT TATAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG"**

Sidomulyo, Mei 2024

Informan



**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Madih

Alamat : Tafae

Usia : 60

Menerangkan Bahwa

Nama : Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib

Program Studi : Sosiologi Agama

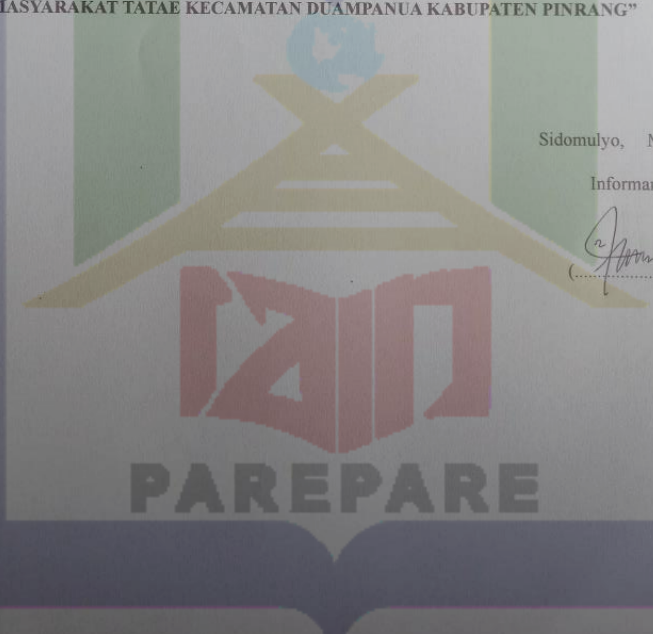
Fakultas : FUAD

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul  
"DINAMIKA KESETRAAN GENDER DALAM MASYARAKAT BUGIS (STUDI KASUS  
MASYARAKAT TATAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG"

Sidomulyo, Mei 2024

Informan

  
(.....)

  
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : HJ. LAPANG

Alamat : Tjate

Usia : 59

Menerangkan Bahwa

Nama : Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib

Program Studi : Sosiologi Agama

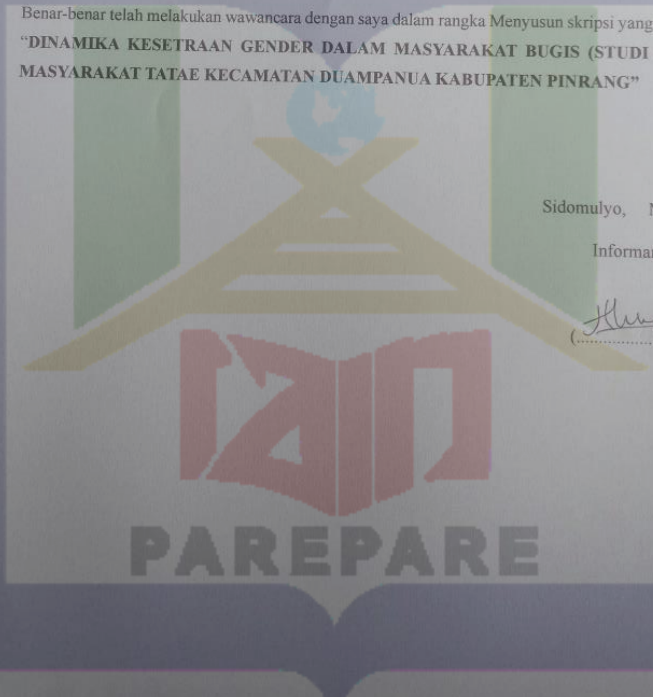
Fakultas : FUAD

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul  
"DINAMIKA KESETRAAN GENDER DALAM MASYARAKAT BUGIS (STUDI KASUS  
MASYARAKAT TATAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG"

Sidomulyo, Mei 2024

Informan

  
(.....)

  
PAREPARE

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nurumati

Alamat : Talae

Usia : 49

Menerangkan Bahwa

Nama : Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib

Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : FUAD

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul  
**"DINAMIKA KESETRAAN GENDER DALAM MASYARAKAT BUGIS (STUDI KASUS  
MASYARAKAT TATAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG"**

Sidomulyo, Mei 2024

Informan

()

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Amugmh Murny

Alamat : Tatae

Usia : 34

Menerangkan Bahwa

Nama : Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib

Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : FUAD

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul  
**"DINAMIKA KESETRAAN GENDER DALAM MASYARAKAT BUGIS (STUDI KASUS  
MASYARAKAT TATAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG"**

Sidomulyo, Mei 2024

Informan

()

**PAREPARE**

# SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Abd. Rahman

Alamat : Tattae

Usia : 60

Menerangkan Bahwa

Nama : Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib

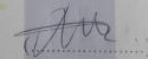
Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : FUAD

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul  
"DINAMIKA KESETRAAN GENDER DALAM MASYARAKAT BUGIS (STUDI KASUS  
MASYARAKAT TATAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG"

Sidomulyo, Mei 2024

Informan



**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Andi Besse

Alamat : Tutae

Usia : 48

Menerangkan Bahwa

Nama : Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib

Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : FUAD

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul  
**"DINAMIKA KESETRAAN GENDER DALAM MASYARAKAT BUGIS (STUDI KASUS  
MASYARAKAT TATAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG"**

Sidomulyo, Mei 2024

Informan

(*[Signature]*)

**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rusdi  
Alamat : Jl. Tefek  
Usia : 31

Menerangkan Bahwa

Nama : Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib

Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : FUAD

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul  
"DINAMIKA KESETRAAN GENDER DALAM MASYARAKAT BUGIS (STUDI KASUS  
MASYARAKAT TATAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG"

Sidomulyo, Mei 2024

Informan

*Rusdi*  
(.....)

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Basri

Alamat : Tanae

Usia : 39

Menerangkan Bahwa

Nama : Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib

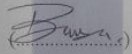
Program Studi : Sosiologi Agama

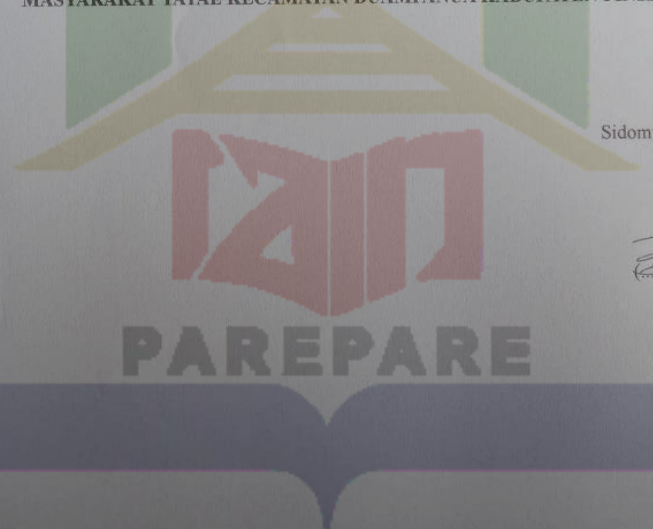
Fakultas : FUAD

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul  
**"DINAMIKA KESETRAAN GENDER DALAM MASYARAKAT BUGIS (STUDI KASUS  
MASYARAKAT TATAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG)"**

Sidomulyo, Mei 2024

Informan



  
**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ahmad S.E

Alamat : Tarek

Usia : 58

Menerangkan Bahwa

Nama : Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib

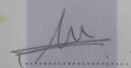
Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : FUAD

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul  
"DINAMIKA KESETRAAN GENDER DALAM MASYARAKAT BUGIS (STUDI KASUS  
MASYARAKAT TATAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG"

Sidomulyo, Mei 2024

Informan

()

**PAREPARE**

## Lampiran 3 Surat Ketetapan Pembimbing



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
NOMOR : B-1033/In.39/FUAD.03/PP.00.9/05/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
  - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 14 Mei 2025 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
  - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 1033 Tahun 2025, tanggal 14 Mei 2025 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
  - Menunjuk saudara: **Abd. Wahidin, M.Si.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :  
Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RUSDI BIN MOHD TALIB  
NIM : 18.3500.022  
Program Studi : Sosiologi Agama  
Judul Penelitian : KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT BUGIS, STUDI KASUS : KELURAHAN TATAE KECAMATAN DUAMPANUA
  - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
  - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
  - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare  
Pada tanggal 14 Mei 2025  
Dekan.



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.  
NIP 196412311992031045

#### Lampiran 4 Surat Izin Meneliti Dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1150/In.39/FUAD.03/PP.00.9/05/2025 22 Mei 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Pinrang  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang  
di  
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD RUSDI BIN MOHD TALIB  
Tempat/Tgl. Lahir : MALAYSIA , 04 Pebruari 1999  
NIM : 18.3500.022  
Fakultas / Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Sosiologi Agama  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Alamat : SIDOMULYO KEC. DUAMPANUA KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

DINAMIKA KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT BUGIS (STUDI KASUS KELURAHAN TATAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.  
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

## Lampiran 5 Surat Izin Meneliti Dari Dinas



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0298/PENELITIAN/DPMTSP/05/2025

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-05-2025, atas nama MUHAMMAD RUSDI BIN MOHD TALIB, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

**Mengingat** :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan** :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0431/R/T.Teknis/DPMTSP/05/2025, Tanggal : 28-05-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0298/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/05/2025, Tanggal : 28-05-2025

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : MUHAMMAD RUSDI BIN MOHD TALIB
4. Judul Penelitian : DINAMIKA KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT BUGIS (STUDI KASUS KELURAHAN TATAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG)
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : Masyarakat Tatae
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanua

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 28-11-2025.

**KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

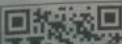


**Biaya : Rp 0,-**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 28 Mei 2025



Lampiran 6 Surat Selesai Meneliti

 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN DUAMPANUA**  
**KELURAHAN TATAE**  
Jalan : R.M. Dahlar No. Sidomulyo Kel. Tatae bKec. Duampanua Pinrang 91251

Sidomulyo, 10 Juni 2025

Nomor : 045.2/05/KT/VI/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada  
Yth, Prodi S1 Sosiologi Agama  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan  
Dakwah  
Universitas IAIN Parepare  
Di,-  
Parepare

Berdasarkan surat saudara Nomor : B-1150/In.39/FUAD.03/PP.00.9/05/2025 Perihal permohonan Izin melaksanakan Penelitian di tKelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Saya Lurah Kelurahan Tatae mengisinkan mahasiswa berikut :

Nama : MUHAMMAD RUSDI BIN MOHD TALIB  
NIM : 18.3500.022  
Fakultas/Prodi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / S1 Sosiologi Agama  
Universitas : IAIN Parepare  
Judul Penelitian : Dinamika Kesteraan Gender dalam masyarakat Bugis (Studi Kasus Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)

Untuk melakukan penelitian di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimah kasih

Lurah Tatae  
  
**AHMAD SE**  
Pejabat Tk. I, III/d  
Nip.19711106 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN DUAMPANUA  
KELURAHAN TATAE

Jalan : R.M. Dahlar No. Sidomulyo Kel.Tatae bKec.Duampanua Pinrang 91251

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 045.2 / 160 / KT / VI / 2025

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD,SE  
Jabatan : LURAH TATAE  
Alamat : JL.SINRANG PEKKABATA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RUSDI BIN MOHD TALIB  
NIM : 18.3500.022  
Fakultas/Prodi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / S1 Sosiologi Agama  
Universitas : IAIN Parepare

Benar telah melakukan study Kasus Dinamika Kesenjangan Gender dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 10 Juni s.d 23 Juni 2025

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

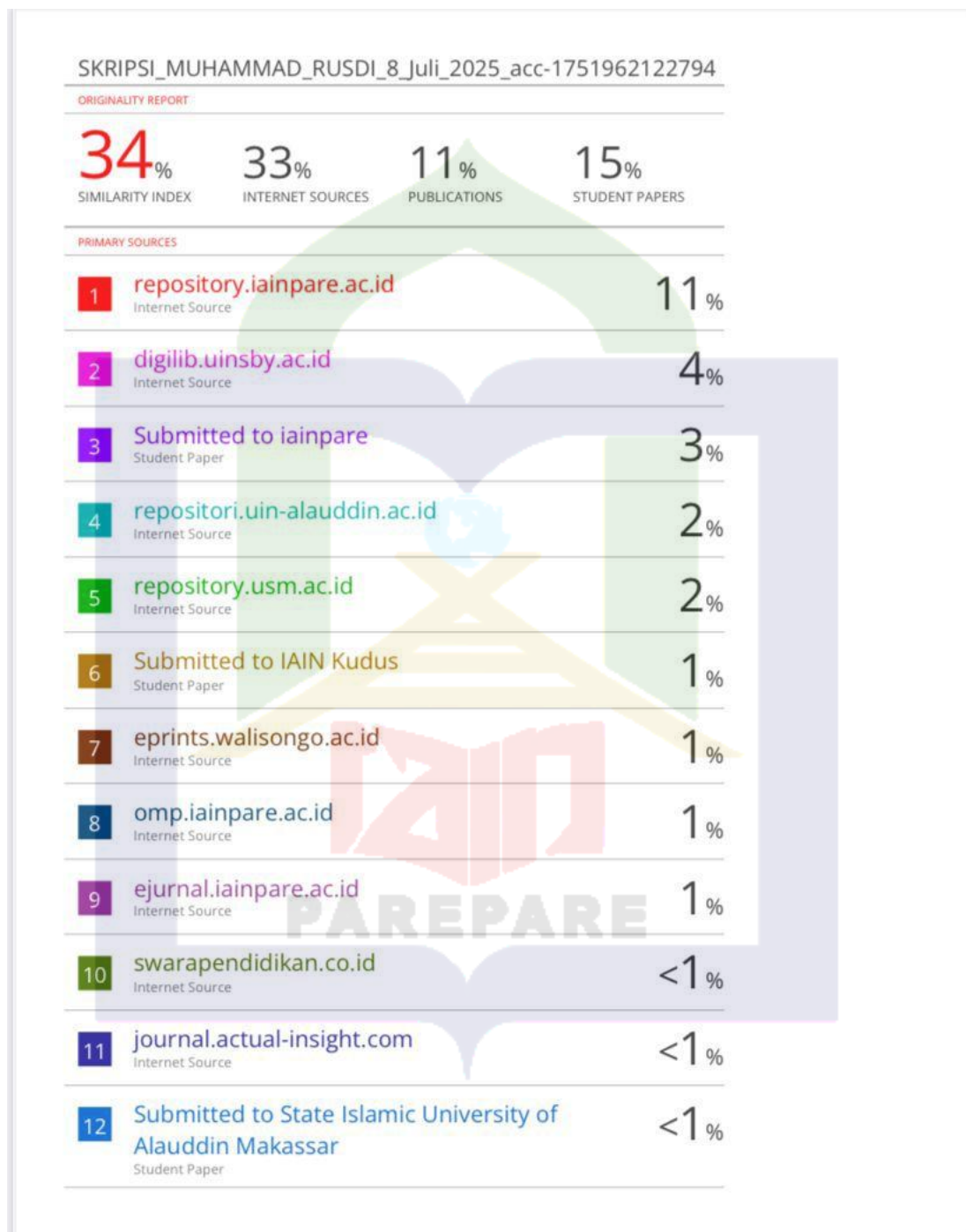
Sidomulyo, 23 Juni 2025

Lurah Tatae

AHMAD, SE  
Pejabat TK.I, III/d

Nip. 19711106 200502 1 001

## Lampiran 7 Turnitin



## Lampiran 8 Dokumentasi







## BIODATA PENULIS



Muhammad Rusdi bin Mohd Talib lahir di Sabah, Malaysia, pada 4 Februari 1999. Ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dan saat ini berdomisili di Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Pendidikan dasar ia tempuh di Sekolah Kebangsaan Suan Lamba (2007–2012), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Duampanua (2012–2015) dan SMA Negeri 2 Pinrang (2015–2018). Pada tahun 2018, ia melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Selama masa studi, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, di antaranya HIMA Prodi Sosiologi Agama (2019) dan komunitas Nalar (2019–2020). Minat akademiknya berfokus pada kajian sosiologi keluarga, gender, dan masyarakat Bugis. Skripsi yang ditulis berjudul “Dinamika Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Bugis (Studi Kasus Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang)” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).